



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI

2022

LAPORAN
KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disusun

secara periodik yang berisi informasi representatif selama 1 (satu) tahun mengenai kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Laporan Kinerja bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisikan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2022 yang sebagian besar sasaran program dapat direalisasikan sesuai dengan komitmen dalam Perjanjian Kinerja.

Melalui laporan ini, kami berharap kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI selama tahun 2022 dapat menjadi bagian dari refleksi dan evaluasi bersama guna peningkatan kinerja Setjen DPR RI, juga dapat memberikan beragam informasi terkait kegiatan pengawasan kepada pembaca yang budiman. “tidak ada gading yang tak retak”, refleksi perjalanan selama satu tahun tentu menggambarkan dinamika yang berarti, perubahan Pasca Pandemi Covid-19 dan tuntutan untuk berbenah terus kami sadari sebagai unit yang berperan penting dalam mengawal Setjen DPR RI menjadi *Good and Clean Governance*. Bagi kami, komitmen adalah kunci dari keberhasilan, sebesar apapun tantangan dan perubahan kami selalu yakin dan optimis bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 17 Januari 2023

Plt. Inspektur Utama


Sumariyandono



TIM PENYUSUN

Pengarah

Ir. Sumariyandono, MPM.

Penanggung Jawab

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn



Ketua

Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B.


Wakil Ketua

Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak.



Sekretaris

Bangun Udi Mustika, S.I.P.



Anggota

Rosweni Sukandar, S.AP.

Haryanti


Zelka Sevrina, S.E.

Alisa Fatimah, S.E.

Arizal Mashudi, A.Md

Sri Nastiti Tri Nurasih, S.E.


Sri Hartati Agustini



Tim Layout

Mikhail Muhamad Jibril, A.Md., Ak.

Muhammad Ilham Antariksa, S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI YANG BERKUALITAS	17
1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI	17
1.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	17
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022	18
1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir dalam Renstra	19
1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kementerian/Lembaga	19
1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi.....	20
1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
1.7. Analisis Program/Kegiatan Inspektorat Utama yang Menunjang Keberhasilan	21
2. NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	22
2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	22
2.2. Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022	23
2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	23
2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kementerian/Lembaga	24
2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi	25
2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian	26
3. Unit Kerja Mendapatkan WBK (Zona Integritas)	27
3.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	27

3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	28
3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	28
3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Kementerian/Lembaga	29
3.5.	Analisis penyebab ketidakberhasilan kinerja serta alternatif solusi	30
3.6.	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	30
3.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ...	31
4.	TINGKAT KEPATUHAN LHKPN	32
4.1.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN Di Inspektorat Utama.....	32
4.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKPN	33
4.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	34
4.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kementerian/Lembaga	34
4.5.	Perbandingan Analisis Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKPN	35
4.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
4.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	36
5.	TINGKAT KEPATUHAN LHKASN	36
5.1.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Di Inspektorat Utama	36
5.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKASN	37
5.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	38
5.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional atau Capaian Kementerian/Lembaga Tingkat Kepatuhan LHKASN	39
5.5.	Perbandingan Analisis Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKASN serta Alternatif Solusi	39
5.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
5.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	40
MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI		41
6.	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	41
6.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	41
6.2.	Perbandingan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020-2022	43
6.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas SPIP Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	43
6.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga	44
6.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi	44
6.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	45

6.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP	45
7.	Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	46
7.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	46
7.2.	Perbandingan Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Tahun 2020-2022	47
7.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	48
7.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga	48
7.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi	48
7.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	49
7.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	49
	MENINGKATNYA PENYELESAIAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN	50
8.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	50
8.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	50
8.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP BPK Tahun 2020-2022	51
8.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	51
8.4.	Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Setjen DPR RI dengan Standar Nasional atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi Lain	53
8.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Serta Alternatif Solusi	54
8.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	55
8.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ..	55
9.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Utama	56
9.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	56
9.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2020 – 2022	57
9.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	58
9.4.	Perbandingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi ..	58
9.5.	Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi	59
9.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	60
9.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ..	60
	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPABILITAS ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA	61

10. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama	61
10.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	61
10.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2022	62
10.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	62
10.4. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional atau Capaian Kementerian/Lembaga	63
10.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi	63
10.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	63
10.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ..	64
11. Nilai Evaluasi Sakip di Lingkup Inspektorat Utama	65
11.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	65
11.2. Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Di Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2022	66
11.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	66
11.4. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi	67
11.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi	67
11.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	68
11.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ..	68
12. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	69
12.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja	69
12.2. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020 – 2022	70
12.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP Terhadap Target Dalam Renstra	70
12.4. Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi	71
12.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi	71
12.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	72
12.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ..	72
BAB IV REALISASI ANGGARAN	74
A. Pagu Anggaran	74
B. Penggunaan Anggaran	75
BAB V PENUTUP	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama	6
Tabel 2.	Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024 (Renstra Utama)	9
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2022	11
Tabel 4.	Capaian Kinerja ITTAMA Tahun 2022	14
Tabel 5.	Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022	15
Tabel 6.	Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra	16
Tabel 7.	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	17
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2022	18
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Dengan Target Akhir Renstra	19
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI, DPD RI dan DPR RI	19
Tabel 11.	Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	20
Tabel 12.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya atas Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	21
Tabel 13.	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 14.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 – 2022	23
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir di Renstra	24
Tabel 16.	Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja MPR RI, KPK dan DPR RI Pada Tahun 2021	24
Tabel 17.	Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Pencapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Tahun 2022	25
Tabel 18.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	26
Tabel 19.	Perbandingan target dan realisasi jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK pada tahun 2022	27
Tabel 20.	Perbandingan Capaian Kinerja unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan WBK Tahun 2020 – 2022	28
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Unit yang mendapatkan WBK dengan Target Akhir Renstra	28
Tabel 22.	Perbandingan Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK Tahun 2022 di BPOM, Kemenpan RB dan Setjen DPR RI	29
Tabel 23.	Penyebab Ketidakberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Unit Kerja Yang Tidak Mendapatkan Predikat WBK	30
Tabel 24.	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Unit Kerja Eselon II yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM	30

Tabel 25. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN	32
Tabel 26. Perbandingan Wajib Laport LHKPN Di Setjen DPR RI	32
Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKPN	33
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2022 Dengan Renstra	34
Tabel 29. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN dengan Standar Nasional	34
Tabel 30. Analisis Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKPN	35
Tabel 31. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN	35
Tabel 32. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Di Inspektorat Utama	36
Tabel 33. Perbandingan Wajib LHKASN Di Lingkup Tugas Inspektorat II	37
Tabel 34. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 – 2022	37
Tabel 35. Perbandingan realisasi kinerja tingkat Kepatuhan LHKASN dengan target jangka menengah	38
Tabel 36. Analisis penyebab keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKASN	39
Tabel 37. Analisa Atas Penggunaan Sumber Daya Atas Pencapaian Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN	40
Tabel 38. Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP	41
Tabel 39. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	42
Tabel 40. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020 – 2022	43
Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra	43
Tabel 42. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Hasil Penilaian Maturitas SPIP	44
Tabel 43. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP	45
Tabel 44. Perbandingan Target Dan Realisasi Atas Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	46
Tabel 45. Perbandingan Capaian Kinerja Atas Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Pada Tahun 2020 – 2022	47
Tabel 46. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 dengan Target Akhir pada Renstra	48
Tabel 47. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi atas Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	48
Tabel 48. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Untuk Mencapai Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	49
Tabel 49. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Pada Tahun 2022	50
Tabel 50. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP BPK Tahun 2020- 2022	51

Tabel 51. Perbandingan Capaian Kinerja Dan Renstra Atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	51
Tabel 52. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	54
Tabel 53. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya atas Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	55
Tabel 54. Perbandingan target dan realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP	56
Tabel 55. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2020 – 2022	57
Tabel 56. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan Renstra	58
Tabel 57. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	59
Tabel 58. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60
Tabel 59. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama	61
Tabel 60. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2022	62
Tabel 61. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkup Inspektorat Utama dengan Renstra	62
Tabel 62. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	63
Tabel 63. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama	63
Tabel 64. Perbandingan target dan realisasi Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama	65
Tabel 65. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Sakip Di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2022	66
Tabel 66. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2022 dengan Renstra	66
Tabel 67. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Nilai Evaluasi Sakip di Lingkup Inspektorat Utama	67
Tabel 68. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama	68
Tabel 69. Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP ...	69
Tabel 70. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020 – 2022	70
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP Terhadap Target Dalam Renstra	70
Tabel 72. Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Dengan Setjen DPD RI	71

Tabel 73. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	71
Tabel 74. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	72
Tabel 75. Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I Tahun 2022	74
Tabel 76. Realisasi Anggaran Inspektorat I	77
Tabel 77. Realisasi Anggaran Inspektorat II	79
Tabel 78. Realisasi Anggaran Inspektur Utama	81
Tabel 79. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fungsi Inspektorat Utama	3
Gambar 2. Struktur organisasi Inspektorat Utama	4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah SDM Inspektorat Utama Setjen DPR RI	5
Grafik 2. <i>Progress</i> Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022	33
Grafik 3. <i>Progress</i> Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022	38
Grafik 4. <i>Progress</i> Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	52
Grafik 5. <i>Progress</i> Penyelesaian TLHP Lembaga Tinggi	53
Grafik 6. Realisasi Anggaran Inspektorat I per Triwulan Tahun 2022	76
Grafik 7. Realisasi Anggaran Inspektorat II per Triwulan Tahun 2022	78
Grafik 8. Realisasi Anggaran Inspektur Utama per Triwulan Tahun 2022	80
Grafik 9. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Inspektorat Utama menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja (IK). Gambaran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)	BB* (77,19)	96,47%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (60-70)	B* (65,31)	100%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%
		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	4	200%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A (40,01)	AA (48,42)	121,01%
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B (60,01)	BB (70,90)	118,14%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%

Program	Anggaran	Efisiensi Anggaran	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen	Rp.8.801.262.000	Rp.1.266.892.000	Rp. 7.534.370.000	Rp.7.520.859.143	99.82%

* Realisasi tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja, 5 (lima) indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP, Nilai Indeks RB dan Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat utama serta jumlah unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3, namun terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum tercapai 100% yaitu Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, hanya tercapai 67% dan Nilai Indeks RB dengan capaian 85,76% yang menggunakan capaian tahun 2021, hal ini dikarenakan belum keluarnya hasil evaluasi dari Kemenpan RB begitupula untuk Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih menggunakan capaian tahun 2021. Untuk dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 adalah sebesar Rp7.534.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.520.859.143,- atau 99,82%.

Keberhasilan pencapaian target tahun ini, merupakan hasil dari koordinasi dan pendampingan secara intensif kepada unit kerja terkait di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedepan, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama
3. Pendampingan Intensif atas kegiatan-kegiatan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.



**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



BAB I PENDAHULUAN

2022
Laporan Kinerja
Inspektoralat Utama Setjen DPR RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Inspektorat Utama merupakan unsur pendukung Setjen DPR RI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 dalam pasal 16. Sebagai unsur yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal, Inspektorat Utama hadir untuk memperkuat Setjen DPR RI menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan *Grand Design* reformasi birokrasi di Indonesia (pemerintah berkelas dunia). Selain itu, Inspektorat Utama berperan sentral dalam mengawal perjalanan dan keberhasilan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga dalam perjalanannya, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkarakter profesional, berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagaimana fungsinya, Inspektorat Utama bertugas melakukan pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Pada tahun 2022 Inspektorat Utama melakukan berbagai macam program pengawasan yang tercermin dalam PKPT berbasis risiko. Kegiatan pengawasan yang terangkum dalam PKPT tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dikarenakan dalam perjalanannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perubahannya. Seperti, banyaknya permintaan kegiatan pendampingan dari beberapa unit kerja yang pada akhirnya menggantikan kegiatan yang sudah terencana. Banyaknya permintaan menunjukkan bahwa peran Inspektorat telah optimal dalam membangun *trust* kepada auditi.

Penyusunan Laporan Kinerja di Inspektorat Utama adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dikerjakan selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang ditargetkan dan pencapaiannya.

Inspektorat Utama mengelola anggaran yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II dan Inspektur Utama. Pagu Anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir tahun 2022 yang dikelola sebesar **Rp7.534.370.000,-** terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp2.743.108.000,-** Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp1.405.896.000,-** dan Inspektur Utama dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp3.385.366.000,-**. Merujuk pada UU MD3, Anggaran DPR RI dikelola oleh Sekretariat Jenderal, termasuk Inspektorat Utama. Dengan kewenangan tersebut, maka kewajiban perencanaan anggaran, realisasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan kinerjanya menjadi tanggungjawab Inspektorat Utama sebagai salah satu unsur terkait dalam Setjen DPR RI.

Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan informasi pencapaian kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI setiap tahunnya dipublikasikan melalui website *ittama.dpr.go.id* yang dapat diakses langsung oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI yang di dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

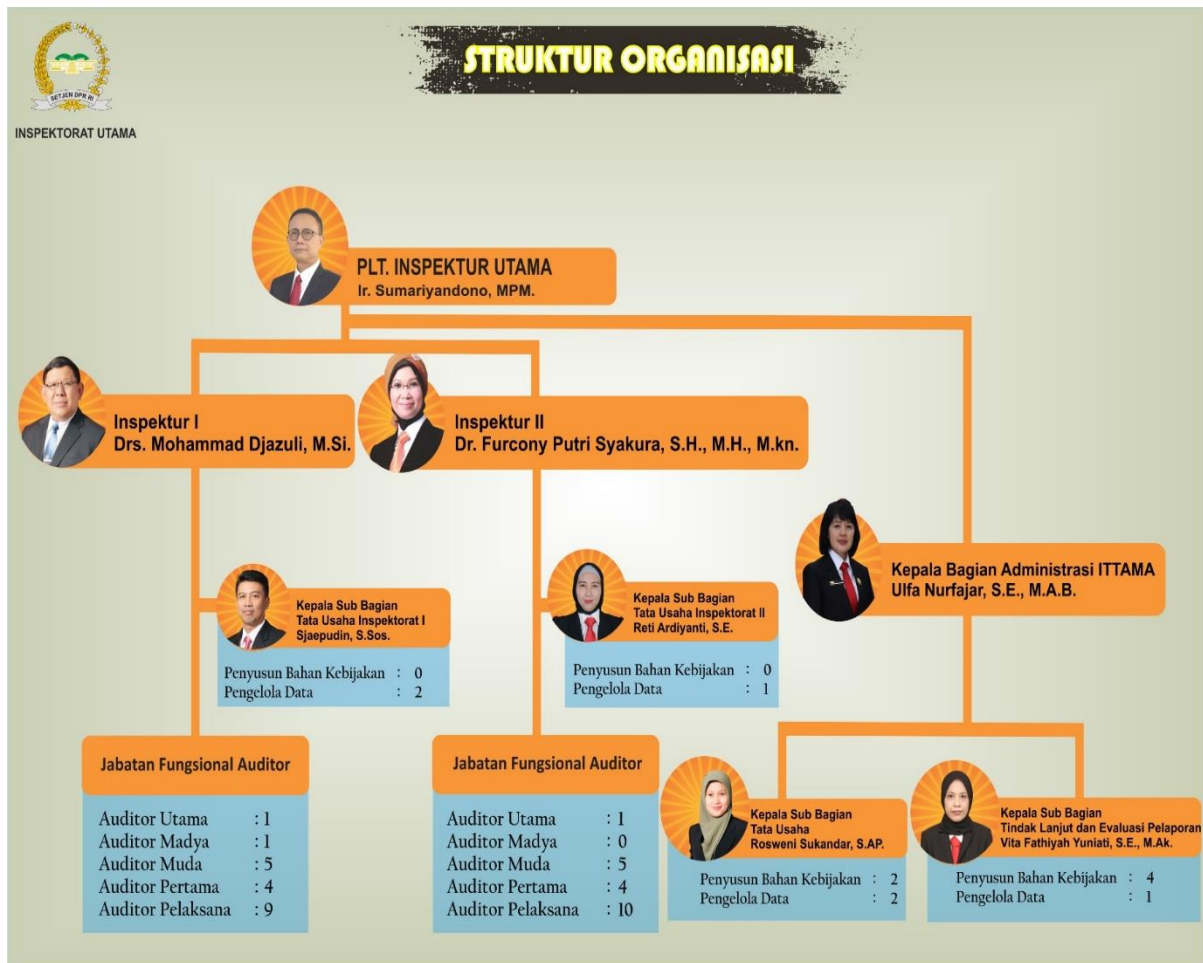
Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bagian keenam pasal 310 Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama, berikut adalah fungsi Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang selanjutnya disebut Ittama Setjen DPR RI.



Gambar 1. Fungsi Inspektorat Utama Setjen DPR RI
(sumber : Data yang diolah oleh Ittama)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Administrasi Inspektorat Utama, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di dalam Inspektorat I dan II juga terdapat Pejabat Pelaksana

yang dipimpin oleh kepala subbagian (kasubag) dan bertugas untuk membantu kelancaran Administrasi. Berikut adalah struktur organisasi Ittama Setjen DPR RI:



Gambar 2. Struktur organisasi Inspektorat Utama (Sumber: Data yang diolah oleh Ittama)

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama Setjen DPR RI diatas, secara keseluruhan SDM Inspektorat Utama terdapat enam puluh satu orang dan sebagian besar telah dibekali pelatihan yang memadai.

D. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

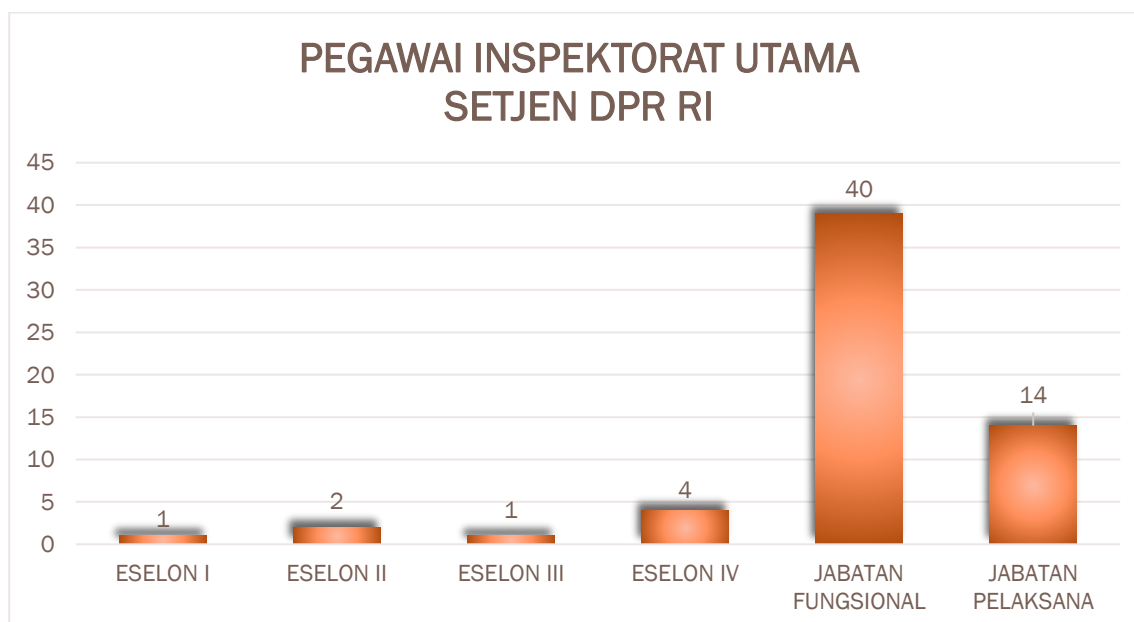
Dalam mencapai kinerja tahun 2022, Inspektorat Utama menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK bergantung pada upaya dari unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM.

Inspektorat utama sebagai pendamping dan tim penilai internal zona integritas memiliki tantangan yang berat tatkala unit kerja yang diusulkan tidak termotivasi dan memiliki kesiapan memadai untuk menjadi zona integritas, hal ini dikarenakan

pada perjanjian kinerja unit kerja yang diusulkan menjadi zona integritas tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Penetapan indikator tersebut dalam perjanjian kinerja unit kerja yang diusulkan menjadi zona integritas, pendampingan intensif serta adanya dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terkait.

2. Jumlah sumber daya manusia Utama dalam pelaksanaan Pengawasan Internal Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara keseluruhan, komposisi pegawai yang ada di lingkup Inspektorat Utama saat ini terdiri dari Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pelaksana. Total SDM Inspektorat Utama berjumlah enam puluh satu orang terdiri dari dua puluh orang jabatan struktural, dua orang auditor madya, satu orang madya, sepuluh auditor muda, delapan auditor pertama, sembilan belas auditor terampil. Berikut adalah grafik jumlah SDM Utama Setjen DPR RI:



Grafik 1. Jumlah SDM Inspektorat Utama Setjen DPR RI

Berdasarkan komposisi SDM di Utama Setjen DPR RI dibandingkan dengan jumlah ideal yang dibutuhkan sesuai analisa jabatan, maka utama masih membutuhkan penambahan pada Jabatan Fungsional yaitu 3 (tiga) orang pada jabatan auditor madya, 2 (dua) orang pada jabatan auditor muda, dan 9

(Sembilan) pada auditor terampil, jumlah kebutuhan jabatan fungsional auditor ittama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	JABATAN	JUMLAH AUDITOR	
		Ideal	Tersedia
1	Auditor Utama	2	2
2	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	1
3	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	10
4	Auditor Pertama/Auditor Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	27
	Jumlah	54	40

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama (sumber: Renstra Ittama 2020 – 2024)

Jumlah kebutuhan ini berdasarkan perhitungan beban kerja, untuk setiap satu gugus tugas (GT) idealnya terdiri dari 1 (satu) orang auditor madya, 3 (tiga) auditor muda dan 9 (sembilan) orang auditor terampil. Sehingga 1 (satu) GT terdiri dari (13) tiga belas auditor dengan 60 (enam puluh lima) hari pengawasan. Untuk menghadapi tantangan ini maka saat ini, dalam 1 (satu) gugus tugas terdiri dari 1 (satu) orang auditor utama sebagai pengendali mutu, 1 (satu) orang auditor madya sebagai pengendali teknis, 1 (satu) auditor muda/auditor pertama sebagai ketua tim dan 3 (tiga) orang auditor terampil. Dengan adanya kekurangan sdm ini, beban kerja auditor menjadi lebih berat, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas dalam pelaksanaan pengawasan internal di Setjen DPR RI.

Dalam menjawab tantangan strategis tersebut, Inspektorat Utama berfokus pada 3 (tiga) hal utama, yaitu:

1. Penguatan tata kelola pengawasan berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama
3. Pendampingan Intensif atas kegiatan-kegiatan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.



**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2022
Laporan Kinerja
Inspektorat Utama Setjen DPR RI

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Inspektorat 2020-2024 disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Strategis Setjen DPR RI tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Persekjen DPR RI nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan, serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

VISI

Mewujudkan Inspektorat Utama Yang Profesional Dan Kompeten

MISI

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern yang independen dan obyektif.
3. Meningkatkan profesionalitas APIP.
4. Menyelenggarakan fungsi konsultansi yang solutif.

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas;	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terwujudnya level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang optimal;	2. Meningkatnya efektifitas pengawasan intern melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang berkualitas;
3. Terwujudnya tata kelola pengawasan intern yang efektif, efisien dan akuntabel.	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Sasaran strategis di dalam Renstra memiliki indikator kinerja program serta target yang terbagi ke dalam beberapa kegiatan dan masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target yang harus dicapai sebagaimana terlihat dalam tabel 2 dibawah ini:

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					TARGET
			2020	2021	2022	2023	2024	AKHIR
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA	AA
		Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 unit kerja	6 unit kerja	10 unit kerja	14 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja
	Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	6 unit kerja	12 unit kerja	18 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja
	Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Telaah Sejawat (Skor <i>Peer Review</i>)	-	-	-	Baik	-	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A	A
		Presentase tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Audit oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan asset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Presentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Presentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Utama	Sertifikasi Auditor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Inspektorat Utama	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Presentase sarana dan prasarana Inspektorat Utama	75%	80%	85%	100%	100%	100%
	Pengeolaan Anggaran Inspektorat Utama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	96%	96%	96%	98%	98%	98%

Tabel 2. Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024 (Renstra Ittama)
(Sumber : Renstra Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2020-2024)

Pada Renstra Ittama, terdapat beberapa indikator kinerja yang berbeda dengan yang ditetapkan pada renstra Setjen DPR RI sehingga berpengaruh pada perjanjian kinerja ittama, hal ini karena Renstra Ittama menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC) untuk mengukur hasil kerja, sedangkan perjanjian kinerjanya mengikuti renstra Setjen DPR RI yang pengukuran kinerjanya menggunakan BSC yang telah dimodifikasi, maka kedepannya akan dilakukan penyesuaian sasaran program dan indikator kinerja pada renstra ittama.

Perbedaan Renstra Ittama 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang akan diperbaiki pada tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Renstra Ittama terdapat 1 (satu) sasaran program sedangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 4 (empat) sasaran program.
2. Pada Renstra Ittama terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja sedangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja dengan nomenklatur yang berbeda.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020- 2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Tabel 3 menunjukkan Perjanjian Kinerja Ittama DPR RI Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3

Tabel 3. Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2022
(Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satker Setjen)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat beberapa indikator kinerja kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan yang berbeda antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perbedaan indikator kinerja disebabkan karena perbedaan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sedangkan perbedaan target kinerja dikarenakan adanya penyesuaian target yang mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya dan dinamika organisasi.



**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2022
Laporan Kinerja
Inspektorat Utama Setjen DPR RI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama tercermin dalam capaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja dan alokasi anggaran yang telah disediakan. Capaian kinerja tahun 2022 tercermin di dalam tabel berikut ini:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)	BB* (77,19)	96,47%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (60-70)	B * (65,31)	100%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%
		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	3	150%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A (40,01)	AA (48,42)	121,01%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	organisasi Inspektorat Utama	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B (60,01)	BB (70,90)	118,14%
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%

* realisasi tahun 2021

Tabel 4. Capaian Kinerja ITTAMA Tahun 2022
(Sumber: Data ittama yang diolah)

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021					Tahun 2022						
Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)	BB* (77.19)	96,47%
	2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (65,31)	100%		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (60,01)	B* (65,31)	100%
	3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	4	100%		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%
	4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
	5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%

	2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	3 unit eselon 1	150%		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	4	200%
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	77%	110%	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%
	2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%	46,59%	66,55%		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB	100%	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	AA	121,01%
	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B	100%		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B (60,01)	BB (70,90)	118,14%
	3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	Level 3

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan Tahun 2022

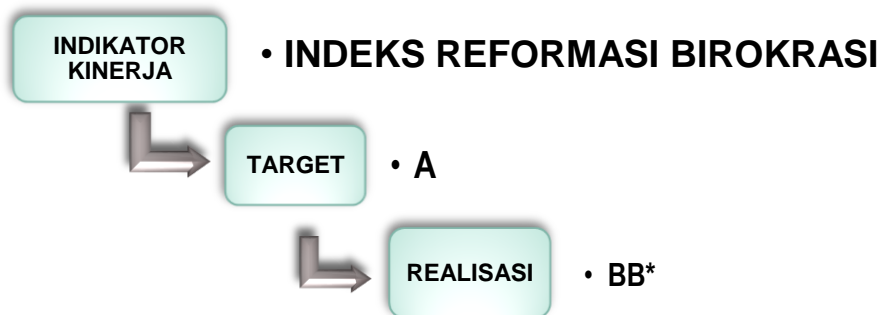
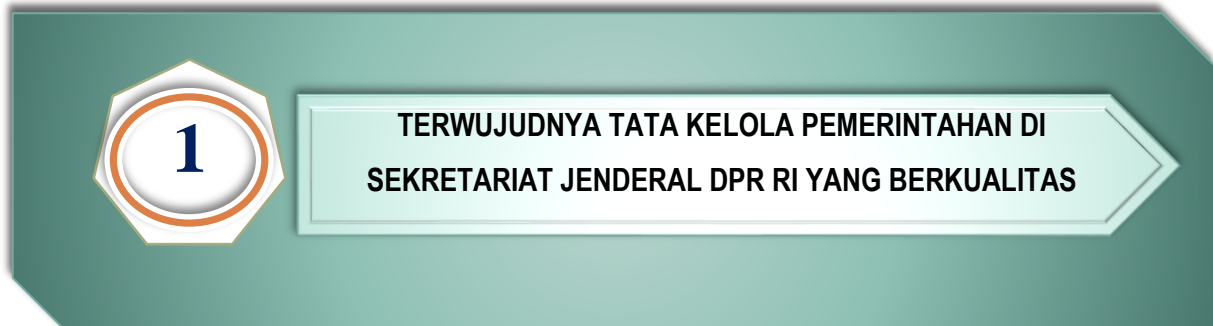
Untuk capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra Ittama adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA	BB*	96,47%
	Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 unit kerja	6 unit kerja	10 unit kerja	14 unit kerja	18 unit kerja	4 unit kerja	40%
Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	6 unit kerja	12 unit kerja	18 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	-	
Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3*	100%
	Telaah Sejawat (Skor Peer Review)	-	-	-	Baik	-	-	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A (80,01)	B* (65,31)	81,62%
	Presentase tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Audit oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	86,75%	102%
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan asset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Presentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	73,13%	86,03%
	Presentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari	100%	100%	100%	100%	100%	-	
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Utama	Sertifikasi Auditor	100%	100%	100%	100%	100%	-	
	Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Inspektorat Utama	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	
Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Presentase sarana dan prasarana Inspektorat Utama	75%	80%	85%	100%	100%	-	
Pengeolaan Anggaran Inspektorat Utama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	96%	96%	96%	98%	98%	-	

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 seperti yang terangkum dalam tabel diatas. Secara terperinci akan dijelaskan pada setiap sasaran dan indikator. Deskripsi tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut:



1.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk target indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2022 adalah A, namun capaiannya belum bisa diukur karena sampai laporan ini disusun, hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB belum ada. Maka untuk realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2022, Setjen DPR RI menggunakan nilai realisasi tahun 2021 yaitu BB dengan skor **77,19**. Maka capaian tahun 2022 dengan menggunakan realisasi nilai realisasi tahun 2021 adalah sebesar **96,47%**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Target	Realisasi	Capaian
A (80,01)	BB* (77,19)	96,47%

*Realisasi tahun 2021

Tabel 7. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2022, Setjen DPR RI melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan nilai secara keseluruhan **83,95** (indeks reformasi birokrasi), masuk dalam kategori **A**, merujuk pada Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintahan Nilai **83,95** masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi memuaskan. Adapun tabel pengukuran nilai indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (76,63)	100%	BB	BB (77,19)	100%	A (80.01)	BB** (77.19)	96,47%

**Realisasi tahun 2021

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 0,56 namun masih dikategori yang sama yaitu BB. Untuk tahun 2022 belum bisa diukur capaiannya secara pasti karena masih menggunakan data realisasi tahun 2021, apabila menggunakan realisasi tahun 2021, maka capaian tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 80.01 untuk kategori A.

Upaya untuk mendorong agar Indeks Reformasi Birokrasi mencapai target adalah:

1. Pendampingan secara intensif di tingkat eselon II dan Setjen DPR RI;
2. Adanya *second line* yaitu Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi (PKORB), yang salah satu tugasnya melaksanakan pengelolaan dan reformasi birokrasi.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB* (77,19)	AA (90,01)	85,75%

*Realisasi tahun 2021

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Dengan Target Akhir Renstra

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 dengan menggunakan realisasi tahun 2021 adalah BB sedangkan target akhir sebesar AA, maka tingkat kemajuan capaian indeks reformasi birokrasi telah mencapai 85,75%.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kementerian/Lembaga/Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau standar Kementerian/Lembaga yang sejenis, tidak bisa dilakukan karena masih menunggu penilaian dari kementerian PAN & RB dan terbitnya laporan kinerja kementerian dan lembaga yang dapat dilihat di *website* masing-masing kementerian/lembaga tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Kementerian/Lembaga lain pada tahun 2021:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	MPR RI			DPD RI			SETJEN DPR RI		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (76,96)	BB (72,06)	93,63%	B (60,01)	B (68,32)	100%	BB (70,01)	BB* (77,19)	100%

* Realisasi tahun 2021

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI, DPD RI dan DPR RI

Dari tabel diatas, Indeks reformasi birokrasi Setjen DPR RI tahun 2021 masih lebih tinggi dari Setjen DPD RI dengan perolehan **68.32** dengan kategori “**B**”. Dan apabila dibandingkan dengan MPR RI, Realisasi atau capaian indeks reformasi birokrasi Setjen DPR RI sebesar **77,19** jauh lebih tinggi dibandingkan perolehan Setjen MPR yaitu **72,06**. Namun apabila dibandingkan dengan **standar nasional** sebesar **75,65**. Maka capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021, Setjen DPR RI telah mengungguli capaian dari MPR RI dan DPD RI bahkan capaian standar nasional.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB*	85.75%	Faktor Penyebab belum berhasilnya pencapaian target yaitu: 1. Belum optimal sosialisasi pengisian lembar kerja evaluasi RB 2. Belum optimal penggunaan teknologi.	Melaksanakan /menindak lanjuti hasil evaluasi Kementerian PAN & RB.

*Realisasi tahun 2021

Tabel 11. Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Faktor penyebab belum berhasilnya pencapaian target indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 adalah belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan pengisian lembar kerja evaluasi RB serta belum optimalnya sistem pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi (Sipenjaga RB). Upaya kedepan, akan dilakukan adalah dengan melaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB.

1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB*	85,75%	Rp0,-	Rp0,-	0%

*Realisasi tahun 2021

Tabel 12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya atas Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

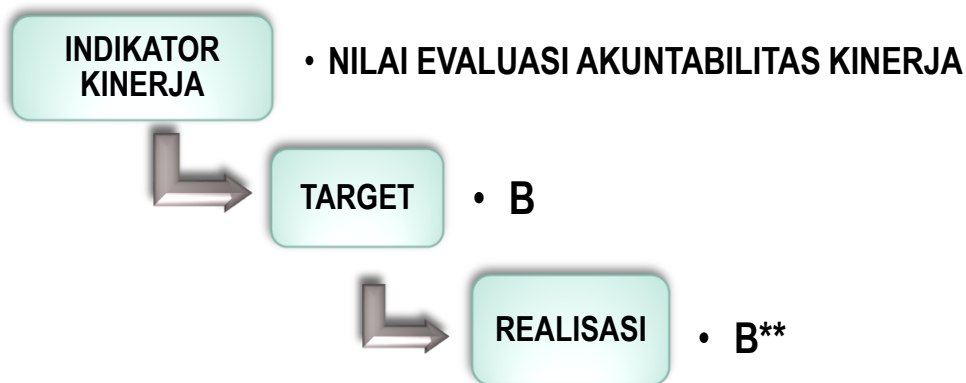
Untuk kegiatan reformasi birokrasi menggunakan anggaran Inspektorat I dan II. Inspektorat utama hanya sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

1.7. Analisis Program/Kegiatan Inspektorat Utama yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi administrasi, Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Pembangunan Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. *Benchmarking/Knowledge Sharing* dalam rangka Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Kapabilitas APIP ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Kota Pontianak dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
5. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, selaku Tim Penilai Internal PMPRB pada 8 Area Perubahan untuk unit kerja Eselon I dan Pusat.

6. Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penggunaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk Memberikan Nilai Penyimpulan Tim Penilai Internal atas RB Unit Eselon I.
7. Rapat koordinasi dalam rangka membahas Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun sebelumnya.
8. Kegiatan sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Visualisasi Video Animasi di Sekretariat Jenderal DPR RI”.



2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Untuk target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 adalah B, namun capaiannya belum bisa diukur karena sampai laporan ini disusun, hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB belum ada. Maka untuk realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022, Setjen DPR RI menggunakan nilai realisasi tahun 2021 yaitu B dengan skor **65,31**. Maka capaian tahun 2022 dengan menggunakan realisasi nilai realisasi tahun 2021 adalah sebesar **100%**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Target	Realisasi	Capaian
B (60-70)	B* (65,31)	100%

*Realisasi tahun 2021

Tabel 13. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2022, Setjen DPR RI melakukan *self assessment* terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, dengan nilai secara keseluruhan sebesar **70,07** masuk dalam kategori BB dengan kategori nilai sangat baik. Adapun tabel pengukuran nilai indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran.

2.2. Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,90)	100%	B	B (65,31)	100%	B	B* (65,31)	100%

*Realisasi tahun 2021

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir diketahui bahwa capaian realisasi mengalami kenaikan meski tidak signifikan dari **64,90** meningkat menjadi **65,31** dengan predikat **B**. namun dikarenakan tahun 2022 menggunakan nilai realisasi tahun 2021, maka tidak ada kenaikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tetapi apabila diproyeksikan dengan nilai dari tim penilai internal di 2022, terjadi peningkatan secara signifikan sebesar 4,76 menjadi **70,07** dengan predikat **BB**.

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

Berikut adalah perbandingan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja atas capaian 2022 dengan target pada renstra yaitu tahun 2024:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B* (65,31)	A (80,01)	81,62%

* Realisasi tahun 2021

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir di Renstra

Berdasarkan tabel diatas, capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 apabila disandingkan dengan target kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada renstra, memiliki tingkat kemajuan sebesar **81,62%**.

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kementerian/Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau standar Kementerian/Lembaga yang sejenis, tidak bisa dilakukan karena masih menunggu penilaian dari kementerian PAN & RB dan terbitnya laporan kinerja Kementerian dan Lembaga yang dapat dilihat di *website* masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Kementerian/Lembaga lain yaitu MPR RI dan KPK pada tahun 2021:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	MPR RI			KPK			SETJEN DPR RI		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	63,56	100%	A	84,72	100%	B	B* (65,31)	100%

* Realisasi tahun 2021

Tabel 16. Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja MPR RI, KPK dan SETJEN DPR RI Pada Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas perolehan SAKIP di Instansi lain yaitu Sekretariat Jenderal MPR RI, pada tahun 2021 perolehan SAKIP MPR RI 63,56 dengan predikat B. Nilai tersebut masih berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI dengan perolehan 65,31 namun masih dalam kategori yang sama. Di tahun 2021, SAKIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencapai predikat A dengan nilai 84,72. Nilai yang diperoleh KPK sudah melebihi rata-rata tingkat perolehan SAKIP secara nasional. Kondisi Setjen DPR RI dengan nilai 65,31 pada tahun 2021 tentunya masih dibawah rata-rata nasional yang ada di kementerian/lembaga. Rata-rata nasional perolehan **SAKIP nasional** berada di angka 71,30 pada tahun 2021 yang sebelumnya telah meningkat dari 70,75 (Erwan Agus Purwanto, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB). Dengan kondisi saat ini, Setjen DPR RI perlu bekerja lebih optimal dalam mendorong seluruh komponen penilaian mulai dari perencanaan kinerja hingga capaian kinerja.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B*	100%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu pelaksanaan evaluasi secara mandiri berdasarkan Permenpan RB No. 88 tahun 2021 dengan membentuk Tim Penilai Internal.	Melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil penilaian internal dan eksternal (kemenpan RB)

*Realisasi tahun 2021

Tabel 17. Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Pencapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, faktor penyebab keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 adalah secara melaksanakan evaluasi secara mandiri berdasarkan amanah dari permenpan RB No, 88 tahun 2021 yaitu dengan membentuk tim penilai internal, selanjutnya kedepannya akan melakukan pemantauan dan menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil penilaian internal dan eksternal.

2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B*	100%	Rp0,-	Rp0,-	0%

* Realisasi tahun 2021

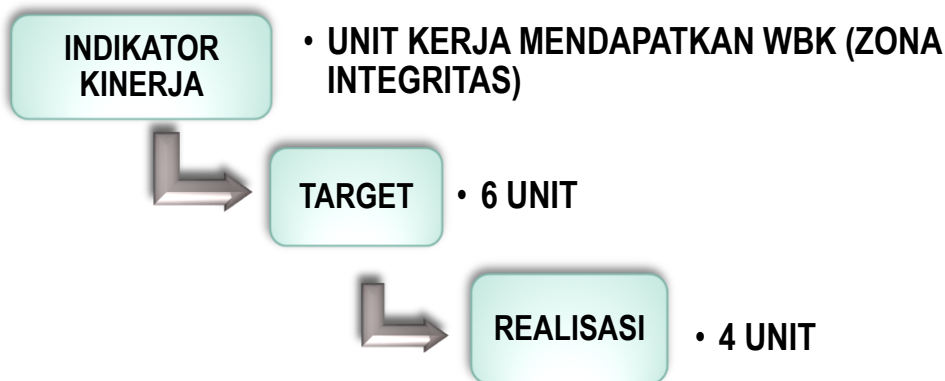
Tabel 18. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk kegiatan terkait nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan anggaran inspektorat I dan II, Inspektorat utama hanya sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat. Bimbingan teknis dimaksudkan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai konsep akuntabilitas, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis kinerja, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal DPR RI.



3.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK pada tahun 2022 adalah **6 unit kerja**, realisasi sampai dengan laporan ini disusun yaitu sebanyak **4 unit kerja**, hasil tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2021, sehingga tahun 2022 capaian kinerja adalah sebesar 67% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Berikut adalah pencapaian kinerja tahun 2022 untuk jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK:

Target	Realisasi	Capaian
6 Unit	4 Unit	67%

Tabel 19. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan WBK Pada Tahun 2022

Untuk unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan WBK pada tahun 2022 adalah Pusat Perancangan Undang-Undang dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, namun kedua unit kerja tersebut belum berhasil untuk meraih predikat WBK.

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK	2	2	100%	4	4	100%	6	4	67%

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Unit Kerja Yang Diajukan Untuk Mendapatkan WBK Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir diketahui bahwa capaian realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021 dengan capaian 100% namun pada tahun 2022 target kinerja tidak dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan Pusat Perancangan Undang-Undang dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 belum berhasil mendapatkan predikat WBK.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK	4	18	22%

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Unit Yang Mendapatkan WBK Dengan Target Akhir Renstra

Capaian Unit yang mendapatkan WBK sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 masih jauh dengan target yang ditetapkan yaitu sejumlah 18 unit. Sehingga saat ini tingkat kemajuannya hanya 22% atau seperempat dari target yang ditetapkan, perlu komitmen dan kerja keras untuk mencapai target di tahun 2024.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional/ Kementerian/ Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau standar Kementerian/Lembaga yang sejenis, tidak bisa dilakukan karena masih menunggu penilaian dari kementerian PAN & RB dan terbitnya laporan kinerja kementerian dan lembaga yang dapat dilihat di *website* masing-masing kementerian/lembaga tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Kementerian/Lembaga lain yaitu BPOM dan Kementerian Luar Negeri tahun 2021:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	BPOM			KEMENTERIAN LUAR NEGERI			SETJEN DPR RI		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK	23 Unit Kerja	23 Unit Kerja	100%	12 Unit Kerja	2 Unit Kerja	16,67%	6 Unit Kerja	4 Unit Kerja	67%

Tabel 22. Perbandingan Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK Tahun 2022 di BPOM, Kemenpan RB dan Setjen DPR RI

Berdasarkan tabel diatas, capaian Setjen DPR RI masih jauh tertinggal apabila melihat capaian dari instansi lain seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) namun diatas dari Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2021 secara total di BPOM terdapat 5 (lima) unit kerja yang telah meraih WBBM, dan 23 (dua puluh tiga) unit kerja telah meraih WBK. BPOM menjadi lembaga yang dinilai sukses dalam implementasi Zona Integritas. Sedangkan Kementerian Luar Negeri dengan target 12 (dua belas) unit kerja tercapai hanya 2 (dua) unit kerja, begitupula dengan Setjen DPR RI hanya mencapai 4 (empat) unit kerja dari 6 (enam) unit kerja yang ditargetkan.

3.5. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Ketidakberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK	6 unit kerja	4 unit kerja	67%	Faktor Penyebab Ketidakberhasilan adalah adanya peraturan baru terkait zona integritas yaitu Permenpan RB No 90 Tahun 2021	Menetapkan indikator kinerja zona Integritas pada perjanjian kinerja unit kerja yang ditetapkan menuju WBK.

Tabel 23. Penyebab Ketidakberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Unit Kerja Yang Tidak Mendapatkan Predikat WBK

Berdasarkan tabel diatas, capaian yang diraih pada tahun 2022 sebesar 67% sehingga tidak memenuhi target di dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2022. Sampai saat pembuatan laporan ini, Kementerian PAN & RB belum mengirimkan hasil secara resmi kepada Setjen DPR RI terkait ketidakberhasilan Pusat Perancangan Undang-Undang dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat tidak dapat meraih predikat WBK. Namun dari hasil pemantauan internal, Setjen DPR RI masih dalam proses adaptasi terhadap aturan baru mengenai pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yaitu Permepan Nomor 90 Tahun 2021 dalam hal pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penambahan indikator di dalamnya.

Upaya yang dilakukan kedepan adalah menetapkan indikator kinerja zona integritas ke dalam perjanjian kinerja unit kerja yang sudah ditetapkan/diajukan menuju WBK. Hal ini dimaksudkan agar unit kerja yang ditetapkan menuju WBK dapat pro aktif dan meningkatkan komitmen lebih di dalam rangka pencapaian menuju unit kerja WBK/WBBM.

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	6 unit kerja	4 unit kerja	67%	Rp0,-	Rp0,-	0%

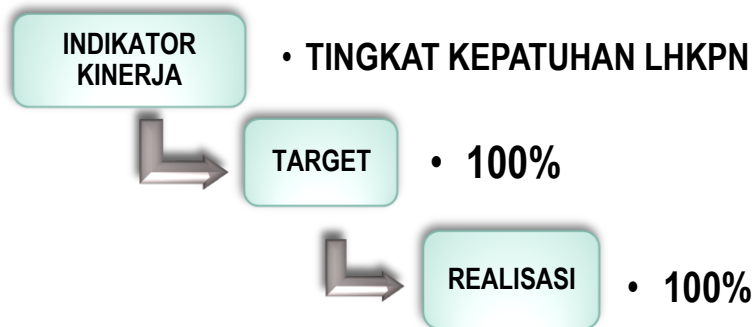
Tabel 24. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Unit Kerja Eselon II yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM

Untuk kegiatan terkait indikator “Unit Kerja Eselon II yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM” menggunakan anggaran inspektorat I dan II. Inspektorat utama hanya sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 untuk menunjang penciptaan dan implementasi Zona Integritas (WBK) antara lain:

1. Menyelenggarakan Sosialisasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah secara luring maupun daring kepada pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro SDMA Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. *Knowledge sharing* dalam rangka Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Kota Padang dan Praktik Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
5. Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022
6. Menghadiri sosialisasi secara virtual Forum Komunikasi Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).



4.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN Di Inspektorat Utama

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Tabel 25. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, diketahui target yang ingin dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKPN ” pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Pada tahun 2022 terkonfirmasi 100% pegawai dengan status telah melaporkan LHKPN Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) pegawai, tercatat 101 (seratus satu) jumlah pegawai Setjen DPR RI yang wajib lapor LHKPN dan secara keseluruhan 101 (seratus satu) pegawai tersebut sudah lapor. Berikut rincian *report* penyampaian LHKPN Setjen DPR RI.

Unit	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	%
Sekretaris Jenderal	1	1	1	100%
Deputi Bidang Administrasi	26	26	26	100%
Deputi Bidang Persidangan	16	16	16	100%
Inspektorat Utama	41	41	41	100%
Badan Keahlian	12	12	12	100%
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3	100%
Pusat Teknologi Informasi	2	2	2	100%
Total	101	101	101	100%

Tabel 26. Perbandingan Wajib Lapor LHKPN Di Setjen DPR RI

Berdasarkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 116/SEKJEN/2022, Inspektorat utama menerbitkan Surat Edaran Nomor 164/SE-SEKJEN/2022 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Setjen DPR RI. Selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan kepatuhan pelaporan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2022. Pada tanggal 31 Maret 2022, sebanyak 101 (seratus satu) Wajib Lapor dari 101 (seratus satu) Wajib Lapor di Setjen DPR RI telah menyampaikan LHKPN melalui website elhkpn.kpk.go.id.

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKPN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKPN	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKPN

Berdasarkan Indikator perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa Indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKPN” baru ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2021, dimana Target tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100% dan selama dua tahun berturut turut, Inspektorat dapat mempertahankan capaian kinerjanya yaitu sebesar 100%.



Grafik 2. Progress Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022

4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2022 Dengan Renstra

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024), diketahui bahwa indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKPN” pada tahun 2022 telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir tahun 2024 sebesar 100%.

4.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kementerian/Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau standar Kementerian/Lembaga yang sejenis, tidak bisa dilakukan karena masih menunggu Laporan Kinerja Tahun 2022 Kementerian dan Lembaga yang dapat dilihat di *website* masing-masing kementerian/lembaga tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah *progress* LHKPN nasional tahun 2018-2020, nilai kepatuhan berkisar antara 95-96%.

Pada tahun 2021 tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN mencapai 94,47% dalam skala nasional. Dibandingkan dengan capaian nasional, LHKPN Setjen DPR RI melebihi yaitu sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Setjen DPR RI
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKPN	94,47%	100%

Tabel 29. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN dengan Standar Nasional

4.5 Perbandingan Analisis Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKPN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: 1. Melakukan pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN). 2. melakukan pendampingan secara efektif terhadap seluruh unit di Setjen DPR RI. 3. Sosialisasi pengisian LHKPN.	Menjaga hubungan baik dan Berkoordinasi secara rutin dengan KPK

Tabel 30. Analisa Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKPN

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan tingkat kepatuhan LHKPN dapat dicapai, karena Ittama telah membentuk tim pemantauan dan pendampingan dalam pengisian LHKPN, melakukan sosialisasi LHKPN dengan narasumber langsung dari KPK, hal ini untuk memastikan semua pegawai dapat mengisi LHKPN dengan benar dan tepat. Kedepan, Inspektorat Utama akan terus menjaga hubungan baik dengan KPK dan selalu berkoordinasi secara rutin.

4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	Rp12.465.000,-	Rp12.465.000,-	100%

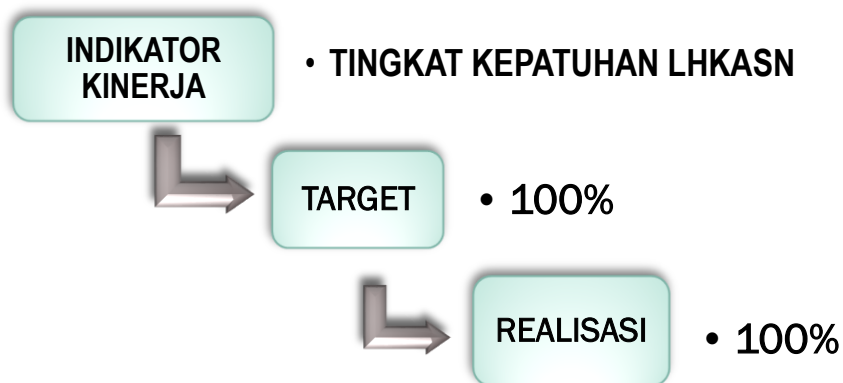
Tabel 31. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKPN” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

4.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKPN”, antara lain:

- a. Pemantuan dan pendampingan LHKPN. Pendampingan berupa bantuan penyelesaian laporan Wajib Laport sampai dengan proses kirim selesai dan berstatus “Sudah Diperbaiki”.
- b. Koordinasi yang dilakukan secara efektif seluruh unit di Setjen DPR RI;
- c. Sosialisasi pengisian LHKPN.



5.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Di Inspektorat Utama

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Tabel 32. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Di Inspektorat Utama

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, diketahui target yang harus dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKASN ” pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%.

Capaian 100% artinya telah terkonfirmasinya bahwa 100% pegawai dengan status telah melaporkan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) pegawai, tercatat 1246 (seribu dua ratus empat puluh enam) jumlah pegawai Setjen DPR RI yang wajib lapor LHKASN dan secara keseluruhan 1246 (seribu dua ratus empat puluh enam) pegawai tersebut sudah lapor. Berikut rincian *report* penyampaian LHKASN Setjen DPR RI.

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	WL LHKPN	WL LHKASN	%
Deputi Bidang Persidangan	517	16	501	100%
Deputi Bidang Administrasi	505	26	479	100%
Badan Keahlian	206	12	194	100%
Insepektorat Utama	61	41	20	100%
Sekretariat Jenderal	58	6	52	100%
Total	1347	101	1246	100%

Tabel 33. Perbandingan Wajib LHKASN Di Lingkup Tugas Inspektorat II

5.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022 Tingkat Kepatuhan LHKASN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKASN	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 34. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan Indikator perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa Indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKASN” baru ditetapkan dalam target di Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 yaitu 100%. Dan Inspektorat Utama telah mampu mencapai target 100% pada tahun 2021 dan 2022.



Grafik 3. Progress Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2022

5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%

Tabel 35. Perbandingan realisasi kinerja tingkat Kepatuhan LHKASN dengan target jangka menengah

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024), diketahui bahwa indikator kinerja “Tingkat kepatuhan LHKASN” pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Sedangkan target pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%. Oleh karena itu, Inspektorat Utama untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tingkat Kepatuhan LHKASN telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

5.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tingkat Kepatuhan LHKASN

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ditemukan data standar nasional LHKASN atau kementerian/lembaga lain sebagai data pembanding.

5.5 Perbandingan Analisis Penyebab Keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKASN Serta Alternatif Solusi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%	Faktor penyebab keberhasilan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat tim pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 2. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap seluruh unit di Setjen DPR RI. 3. Sosialisasi pengisian LHKASN 	Menanamkan budaya sadar lapor

Tabel 36. Analisis penyebab keberhasilan Tingkat Kepatuhan LHKASN

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan tingkat kepatuhan LHKASN dapat dicapai, karena Ittama telah membentuk tim pemantauan dan pendampingan dalam pengisian LHKASN, melakukan sosialisasi LHKASN dengan narasumber langsung dari Kemenpan RB, hal ini untuk memastikan semua pegawai dapat mengisi LHKASN dengan benar dan tepat. Kedepan, Inspektorat Utama akan terus menanamkan budaya sadar lapor ke seluruh ASN di Setjen DPR RI.

5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

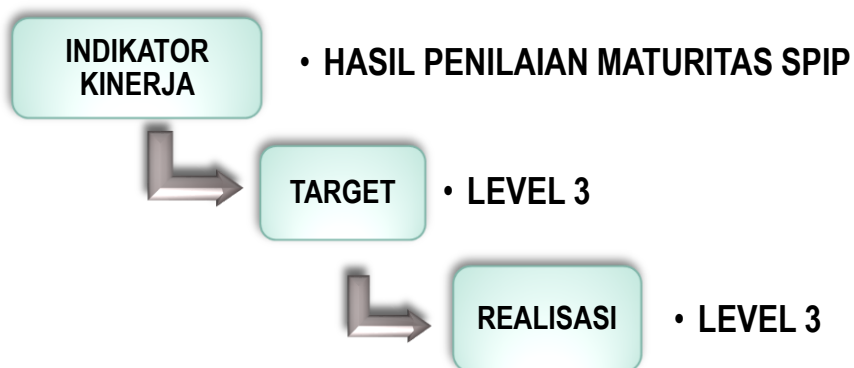
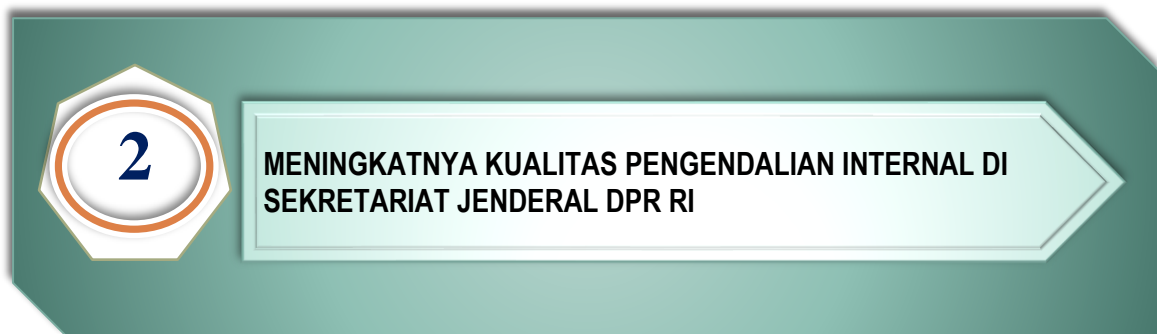
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%	Rp.970.200	Rp.970.200	100%

Tabel 37. Analisa Atas Penggunaan Sumber Daya Atas Pencapaian Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKASN” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

5.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKASN”, adalah melaksanakan pemantauan dan pendampingan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat DPR RI.



6.1 Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
Level 3	Level 3*	100%

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 38. Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, Target hasil nilai maturitas SPIP yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja pada tahun 2022 adalah **level 3**, namun realisasinya sampai dengan laporan disusun, belum diterbitkan baik oleh BPKP RI maupun Kementerian PAN & RB, sehingga untuk pengukuran capaian tahun 2022, Ittama menggunakan capaian tahun 2021 yaitu level 3, sehingga nilai capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan skor 3,185. Namun, berdasarkan hasil tim penilai internal bahwa Hasil Maturitas SPIP di Setjen DPR RI pada tahun 2022 adalah **level 3** dengan skor “**3,328**”. Sehingga terdapat kenaikan skor yang tidak signifikan yaitu 0,143.

Berikut adalah hasil penilaian oleh tim penilai internal tahun 2022 atas maturitas SPIP di Setjen DPR RI:

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	2	1,00
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		3,50
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,318	0,996
Penilaian Risiko	20.00%	3,058	0,612
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,091	0,773
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,475	0,348
Pemantauan	15.00%	2,667	0,400
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3,129
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,938
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		10	1,50
Capaian <i>Outcome</i>	15,00%	5	0,75
Capaian <i>Output</i>	15,00%	5	0,75
Keandalan Pelaporan Keuangan		3	0,75
Opini LK	25.00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara		11	0,85
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10.00%	3	0,30
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan		1	0,20
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		
BOBOT HASIL	30.00%		0,990
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,328

Tabel 39. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

6.2 Perbandingan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3*	100%

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 40. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020 – 2022

Hasil penilaian maturitas SPIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih berada di level 3 yang artinya, bahwa Inspektorat Utama Setjen DPR RI telah mampu mempertahankan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjaminan kualitas di tahun 2022 oleh APIP dengan hasil skor 3,328 di level 3, yang artinya Setjen DPR RI dapat mendefinisikan kerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas SPIP Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3*	-	-

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra

Berdasarkan tabel diatas, hasil penilaian maturitas SPIP tidak dapat dihitung tingkat kemajuannya, hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak tercantum dalam Renstra Inspektorat utama. Kedepannya Renstra Inspektorat Utama akan direvisi sesuai dengan perubahan yang terjadi.

6.4 Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas SPIP dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga

Jika melihat rata-rata capaian nasional, Secara umum data terakhir yang dapat diperoleh tahun 2019 dari BPKP RI, menunjukkan pada level pusat, dari 88 (delapan puluh delapan) Kementerian/Lembaga, jumlah instansi pemerintah yang memperoleh Maturitas SPIP Level 3 yaitu 70 (tujuh puluh) instansi atau sekitar 79,5%. Sementara di level provinsi, dari 33 (tiga puluh tiga) instansi terdapat 27 (dua puluh tujuh) instansi yang memperoleh Maturitas SPIP level 3 atau sekitar 79,41%. Dan pada level daerah yaitu kabupaten/kota, dari 508 (lima ratus delapan) baru 283 (dua ratus delapan puluh tiga) atau sekitar 55,51%. Kemungkinan pada tahun 2022, jumlah maturitas SPIP dengan level 3 mengalami peningkatan secara populasi. Dengan perolehan maturitas SPIP level 3, kualitas penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI setara dengan rata-rata nasional untuk instansi pemerintah pusat.

6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu: 1. pendampingan atas kegiatan penilaian mandiri atas maturitas SPIP di tingkat eselon I dan sekjen 2. Penjaminan kualitas atas implementasi SPIP di tingkat eselon I dan sekjen.	Pemantauan <i>area of improvement</i> implementasi SPIP di unit eselon I dan sekjen

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 42. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 100% pada hasil penilaian maturitas SPIP disebabkan adanya faktor pendampingan dan penjaminan kualitas atas implementasi SPIP di tingkat Eselon I dan Sekjen. Kedepannya, upaya yang dilakukan guna meningkatkan maturitas SPIP ke level 4 adalah melakukan pemantauan atas *area of improvement* implementasi SPIP di tingkat Eselon 1 dan Sekjen. Selain itu, Ittama mulai melakukan pemenuhan eviden untuk mencapai maturitas SPIP level 4.

6.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%	Rp510.231.000,-	Rp510.231.000,-	100%

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 43. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Maturitas SPIP” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

6.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja hasil penilaian maturitas SPIP antara lain:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI”.

2. Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka jarak jauh
3. Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka dan jarak jauh.
4. Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021-2022 di Sekretariat Jenderal DPR RI.
6. Mengikuti Forum Satuan Tugas SPIP yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS.



7.1 Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
2 Unit Kerja	4 Unit Kerja	150%

Tabel 44. Perbandingan Target Dan Realisasi Atas Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, Target unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2022 adalah sebanyak **2 (dua) unit kerja**, dan dapat direalisasikan sebanyak **4 (empat) unit kerja**

eselon I, yaitu Deputy Administrasi, Badan Keahlian dan Deputy persidangan, dan Inspektorat Utama dengan nilai perolehan 3,2 untuk Deputy Administrasi, nilai 3,0 untuk Deputy Persidangan dan Badan Keahlian dan nilai 3,0 untuk Inspektorat Utama, sehingga pada tahun ini, untuk indikator kinerja dari unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 telah meraih capaian sebesar 200%.

7.2 Perbandingan Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Tahun 2020-2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	-	-	-	2 unit kerja	3 unit kerja	150%	2 unit kerja	4 unit kerja	200%

Tabel 45. Perbandingan Capaian Kinerja Atas Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Pada Tahun 2020 – 2022

Jumlah unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 meningkat 1 (satu) unit kerja eselon 1, sehingga pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) unit kerja eselon 1 yang maturitas SPIPnya minimal level 3. Sedangkan untuk tahun 2020, indikator kinerja tersebut belum ditetapkan di perjanjian kinerja Inspektorat Utama.

7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	3 Unit Kerja	-	-

Tabel 46. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 dengan Target Akhir pada Renstra

Berdasarkan tabel diatas, hasil penilaian maturitas SPIP tidak dapat dihitung tingkat kemajuannya, hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak tercantum dalam Renstra Inspektorat Utama. Kedepannya Renstra Inspektorat Utama akan direvisi sesuai dengan perubahan yang terjadi.

7.4 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ditemukan data standar nasional atau kementerian/lembaga lain sebagai data pembanding.

7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Jumlah unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2 unit kerja	4 unit kerja	200%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu: Pendampingan atas pengisian LKE SPIP di tingkat Eselon I dan Sekjen	Pemantauan dan evaluasi secara berkala

Tabel 47. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi atas Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 200% pada Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 disebabkan adanya faktor pendampingan atas pengisian LKE SPIP di tingkat Eselon I dan Sekjen. Kedepannya, upaya yang dilakukan guna mempertahankan capaian adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

7.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2 unit kerja	4 unit kerja	200%	-	-	-

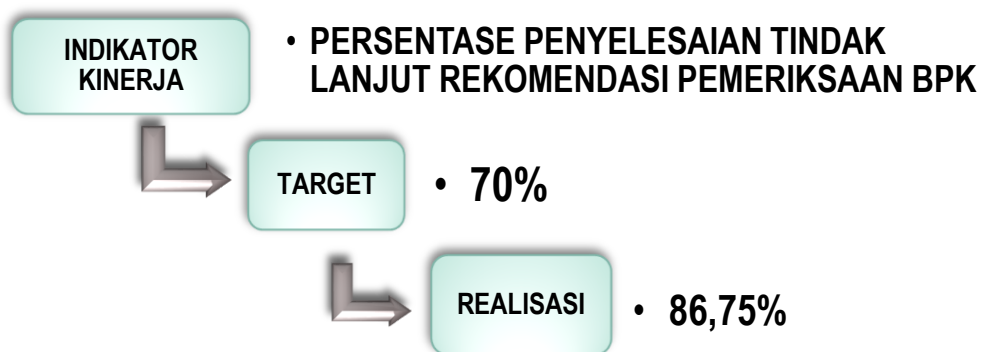
Tabel 48. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Untuk Mencapai Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3

Untuk kegiatan mempertahankan Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3 menggunakan anggaran inspektorat I dan II. Inspektorat utama hanya sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

7.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3

Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3, antara lain melakukan pendampingan pengisian LKE SPIP Terintegrasi.

3 MENINGKATNYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



8.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK pada tahun 2022 adalah 70%, realisasi sampai dengan Semester I 2022 adalah 86,75%. Capaian persentase TLHP BPK melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 124%.

Target	Realisasi	Capaian
70%	86.75%	124%

Tabel 49. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Pada Tahun 2022

Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK ditargetkan mencapai 85%. Target ini berbeda dengan target di dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama dengan capaian 70%. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak lanjut Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester I

Tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 128/LHP/XVI/07/2022, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak tujuh LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2018, serta LHP atas Kinerja Efektifitas Kegiatan Audit Reviu oleh APIP sedangkan tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17 (tujuh belas) LHP.

8.2. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP BPK Tahun 2020-2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	65%	73%	112%	70%	77%	110%	70%	86,75%	124%

Tabel 50. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Tlhp Bpk Tahun 2020- 2022

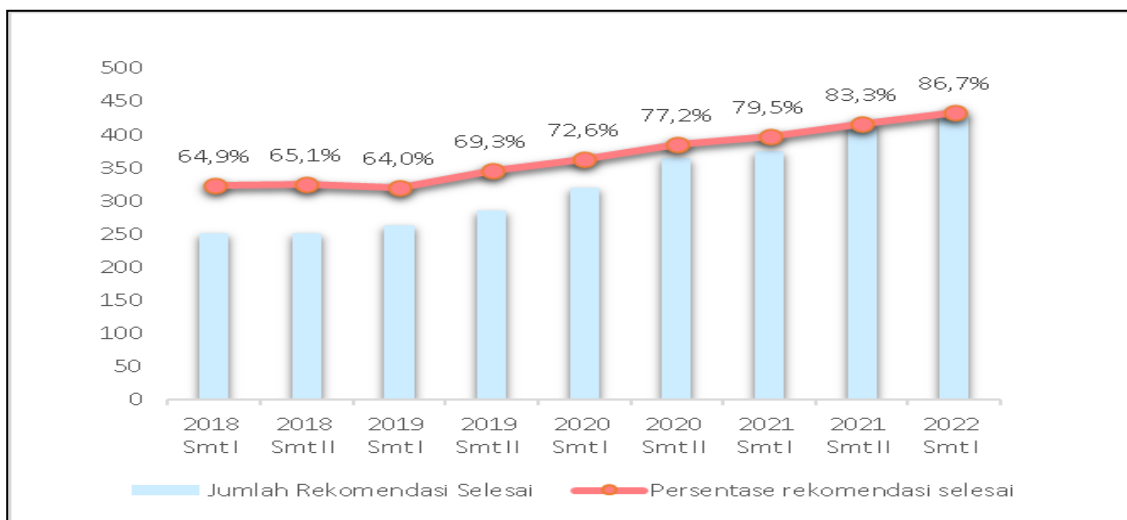
Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir diketahui bahwa realisasi mengalami kenaikan yang signifikan. Capaian yang tinggi ditandai dengan realisasi yang melebihi target selama 3 (tiga) tahun terakhir.

8.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	86,75%	100%	86,75%

Tabel 51. Perbandingan Capaian Kinerja Dan Renstra Atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

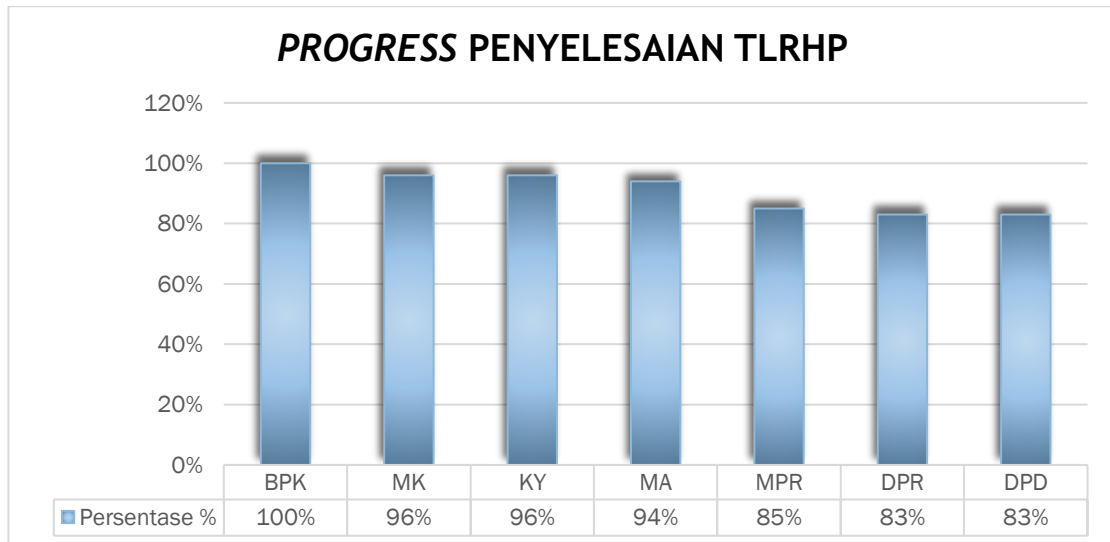
Dari tabel di atas capaian indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 yaitu 100% tingkat kemajuan mencapai 86,75%. Sebagai catatan, target akhir tahun 2024 sebesar 100% dalam renstra ittama, indikatornya adalah presentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari, nomenklatur ini berbeda dengan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yang tertulis yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Ditindaklanjuti berbeda dengan penyelesaian, karena ditindaklanjuti belum tentu temuan tersebut selesai, namun Inspektorat Utama optimis bahwa di tahun 2024 target 100% dapat tercapai mengingat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 penyelesaian rekomendasi BPK menunjukkan tren peningkatan secara berkala. Pada semester I 2018 terdapat 64,86% rekomendasi yang telah selesai di tindaklanjuti, hingga pemantauan semester I 2022 persentase penyelesaian rekomendasi meningkat menjadi 86,75%.



Grafik 4. *Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI*

Penyelesaian TLHP BPK pada awal tahun 2018 hingga semester I tahun 2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada semester II tahun 2019 penyelesaian rekomendasi BPK mulai mengalami peningkatan secara berkala sampai dengan saat ini. Pada pemantauan TLHP semester I 2022 terdapat peningkatan penyelesaian rekomendasi sebesar 3,4% dibandingkan dengan semester sebelumnya.

8.4. Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Setjen DPR RI dengan Standar Nasional atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi Lain



Grafik 5. *Progress Penyelesaian TLHP Lembaga Tinggi*

Pada tahun 2021 data *progress* penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI menunjukkan posisi DPR berada pada urutan ke 6 dari 7 lembaga tinggi negara, diatas DPD namun masih dibawah MPR. Capaian DPR juga masih jauh dari BPK dengan persentase penyelesaian mencapai 100%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian Inspektorat Utama BPOM sebesar 94,24% maka Inspektorat Setjen DPR RI masih tertinggal jauh dibawah Inspektorat Utama BPOM begitupula dengan capaian dari Inspektorat Kementerian Luar Negeri yang mencapai 90,32% pada tahun 2021.

8.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu: (1). Pemantauan tindak lanjut secara efektif terhadap auditi (2). Koordinasi dengan BPK RI dalam proses pemantauan dan pemenuhan eviden. (3). Komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam temuan dan rekomendasi.	(1). Pemantauan tindak lanjut secara rutin terhadap auditi menggunakan teknologi informasi (2). Melakukan kegiatan Cek Fisik terhadap Perusahaan yang belum mengembalikan kewajiban kerugian negara.

Tabel 52. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 124% pada Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI disebabkan adanya faktor sebagai berikut:

- a. Pemantauan tindak lanjut secara efektif terhadap auditi.
- b. Koordinasi dengan BPK RI dalam proses pemantauan dan pemenuhan eviden.
- c. Komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam temuan dan rekomendasi.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut secara rutin terhadap auditi menggunakan teknologi informasi
- b. Melakukan kegiatan Cek Fisik terhadap Perusahaan yang belum mengembalikan kewajiban kerugian negara.

8.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%	Rp17.006.000,-	Rp17.006.000,-	100%

Tabel 53. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

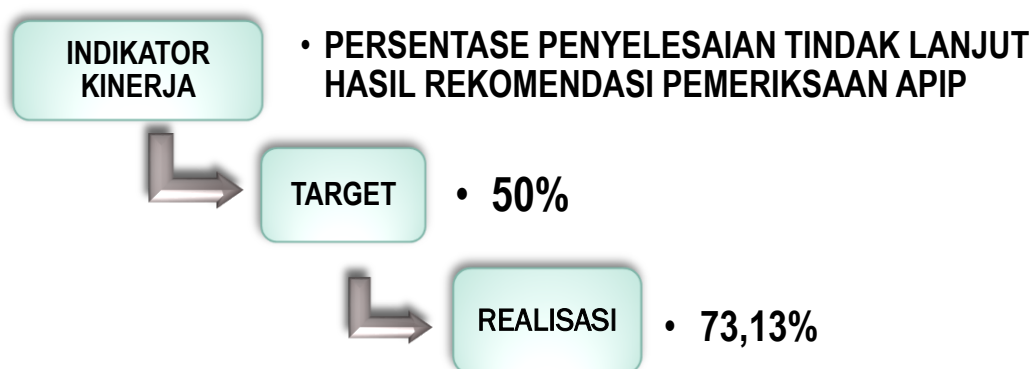
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” dengan indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 124% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

8.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada auditi dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
2. Menyelenggarakan Rapat pembahasan *progress report* tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Melakukan *knowledge sharing* terkait dengan penerapan manajemen pengawasan yang baik, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh (Perwakilan BPKP Provinsi Aceh) dan Inspektorat Provinsi Aceh.

4. Cek fisik dengan tujuan perusahaan yang belum selesai mengembalikan kerugian negara.
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP minimal dua kali setahun sesuai PKPT berbasis risiko.
6. Melaksanakan rapat internal dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait Tuntutan Ganti Kerugian (TGR/KN).



9.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target	Realisasi	Capaian
50%	73,13%	146%

Tabel 54. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 adalah 50%, realisasi sampai dengan Semester II 2022 adalah 73,13%. Capaian persentase TLHP APIP melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 146%.

9.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2020 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	70%	45,59%	66,55%	50%	73,13%	146%

Tabel 55. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2020 – 2022

Berdasarkan *progress* Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari pencapaian tahun 2021 yaitu 47% meningkat menjadi 73% pada tahun 2022 (+26%). Peningkatan tersebut sangat baik sejalan dengan penambahan 88 (delapan puluh delapan) rekomendasi pada tahun 2021 dan 36 (tiga puluh enam) rekomendasi yang diselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 dari 88 (delapan puluh delapan) meningkat menjadi 134 (seratus tiga puluh empat) rekomendasi dengan 93 (sembilan puluh tiga) rekomendasi yang telah diselesaikan.

Pencapaian 73% TLHP APIP melebihi target 50% di dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama sebesar 146%. *Progress* pengembalian kerugian negara TLHP APIP juga mengalami peningkatan dari 62% di tahun 2021 meningkat menjadi 65% pada tahun 2022. Artinya, sampai dengan 2022 Inspektorat Utama berhasil mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp1.647.807.771,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dari hasil pengawasan internal. Meskipun demikian, persentase penyelesaian TLHP APIP harus terus ditingkatkan setiap tahunnya dan menjadi komitmen di Inspektorat Utama melalui peningkatan target Penyelesaian TLHP APIP di Perjanjian Kinerja.

9.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	73,13%.	95%	76,97%

Tabel 56. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan Renstra

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 yaitu sebesar 95%, maka tingkat kemajuan mencapai 76,97%. Target tersebut dapat tercapai di tahun 2024 apabila terdapat komitmen dari auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi dengan tertib dan tepat waktu.

9.4. Perbandingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi.

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ditemukan data perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat Utama terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain pada tahun 2022. Namun, untuk tahun 2021, indikator kinerja tersebut dapat dibandingkan dengan capaian realisasi dari Inspektorat Kementerian Luar Negeri yaitu sebesar 96,72% dan Inspektorat Utama BPOM yang capaian realisasinya sebesar 94,89%. Capaian dua kementerian ini lebih tinggi dibanding capaian yang diperoleh Inspektorat Utama DPR RI yaitu hanya sebesar 73,17%.

9.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu: Pemantauan terhadap hasil pengawasan APIP terhadap temuan Inspektorat II berjalan efektif sehingga persentase TLHP APIP meningkat.	(1). Pemantauan secara rutin menggunakan teknologi informasi (2). Melakukan perbaikan pada pelaporan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Tabel 57 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 146% pada Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP disebabkan adanya faktor Pemantauan terhadap hasil pengawasan APIP terhadap temuan Inspektorat II berjalan efektif mencapai 83,52%, sehingga persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meningkat.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut secara rutin terhadap auditi menggunakan teknologi informasi.
- b. Melakukan perbaikan pada pelaporan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan dengan cara peningkatan kompetensi auditor.

9.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

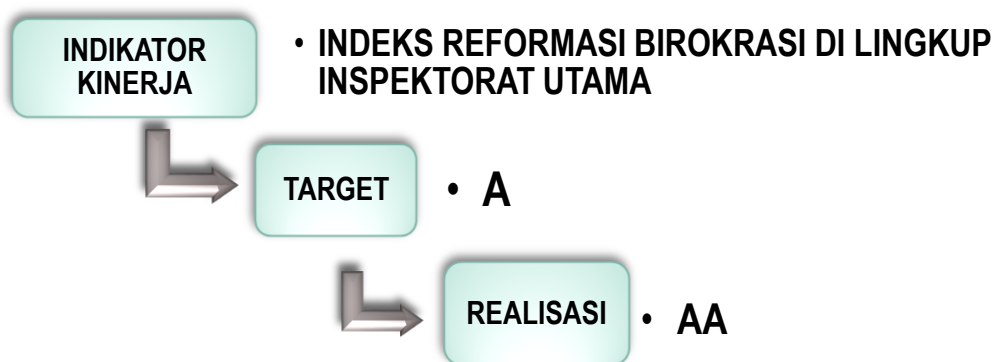
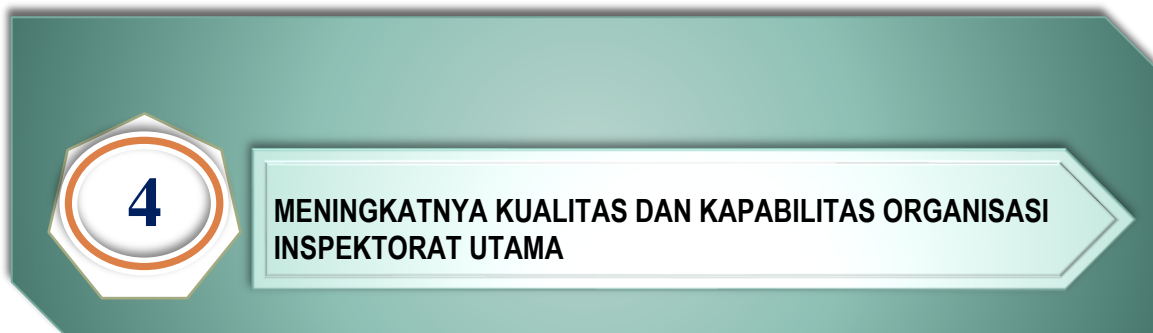
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%	-	-	-

Tabel 58. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” dengan indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif dengan tidak menggunakan anggaran Inspektorat Utama, melainkan menggunakan anggaran dari Inspektorat I dan II.

9.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP antara lain melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara berkala dan melakukan pendampingan kepada auditi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP.



10.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
A (40,01)	AA (48,42)	121,01%

Tabel 59. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama

Hasil Penilaian tim penilai internal bahwa Indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat utama pada tahun 2022 adalah sebesar 48,42. Nilai tersebut masuk dalam kategori **AA** dengan interpretasi **Istimewa**. Atas capaian tersebut, Inspektorat utama telah melebihi target yaitu 121,01%. Adapun tabel pengukuran nilai indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran.

10.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektora t Utama	BB	BB	100%	B	BB	100%	A (40,01)	AA (48,42)	121,01 %

Tabel 60. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 - 2022

Berdasarkan *progress* Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sangat signifikan dari 2020-2021. Meskipun pada area reform terdapat penambahan komponen penilaian terhadap 2 (dua) area, yaitu penilaian terhadap area 7 (tujuh) penguatan pengawasan dan area 8 (delapan) peningkatan kualitas pelayanan publik.

10.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	AA	AA	100%

Tabel 61. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Di Lingkup Inspektorat Utama Dengan Renstra

Dari tabel di atas, capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama adalah AA dengan skor 48,42 jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 Renstra, maka tingkat kemajuan sudah mencapai 100%.

10.4. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional atau Capaian Kementerian/Lembaga

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ditemukan data perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat Utama terkait indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Utama dengan indikator kinerja Inspektorat Kementerian/Lembaga lain.

10.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	AA	121,01%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu penyusunan rencana aksi hasil evaluasi indeks reformasi birokrasi	<i>Monitoring</i> rencana aksi yang telah disusun sesuai <i>timeline</i>

Tabel 62. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Indeks Reformasi Birokrasi Di Lingkup Inspektorat Utama

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 121,01% pada Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama disebabkan oleh adanya penyusunan rencana aksi hasil evaluasi indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Utama sedangkan upaya yang dilakukan kedepannya guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain melakukan *monitoring* rencana aksi yang telah disusun sesuai *timeline*.

10.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	AA	121,01%	Rp516.315.000,-	Rp516.315.000,-	100%

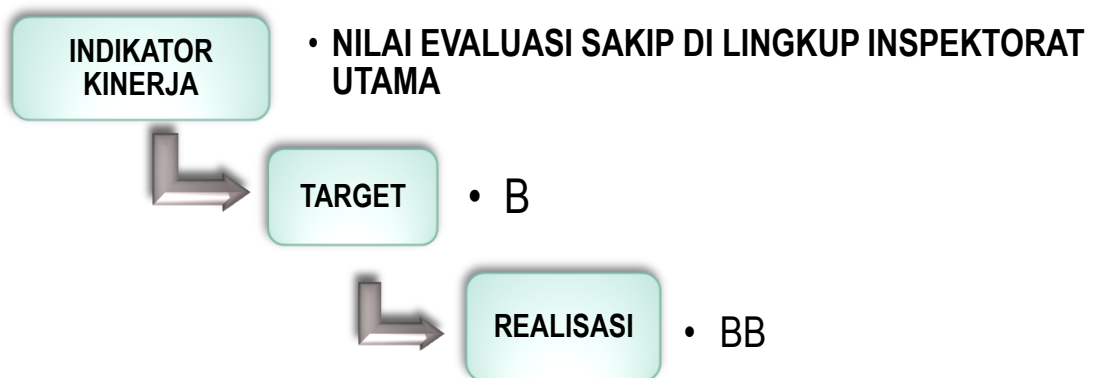
Tabel 63. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Di Lingkup Inspektorat Utama

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI” dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 121,01% dengan implementasi anggaran mencapai 100%.

10.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama antara lain:

1. Rapat Koordinasi Inspektorat Utama dalam rangka pengarahan Inspektur Utama mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
2. Menyelenggarakan Rapat pembahasan rencana aksi Tim Pelaksana PMPRB Inspektorat Utama Tahun 2022
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama tahun 2022
4. Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Melaksanakan rapat konsensus Penilaian Akhir Tim Penilai Internal (TPI) Reformasi Birokrasi Tingkat Unit Kerja Eselon I/Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.



11.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
B (60,01)	BB (70,90)	118,14%

Tabel 64. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama

Target Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama pada tahun 2022 adalah B, realisasi pada tahun 2022 adalah BB. Capaian Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama adalah 118,14%. Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 di lingkup Inspektorat Utama menunjukkan peningkatan yang signifikan dari predikat **B (baik)** menjadi **BB (sangat baik)**. Predikat **BB** artinya akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator. Adapun tabel pengukuran nilai indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran.

11.2. Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Di Inspektorat Utama Tahun 2020 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B	100%	B	B	100%	B (60,01)	BB (70,9)	118,14%

Tabel 65. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan *progress* nilai evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi perubahan dari predikat B meningkat menjadi BB dengan skor 70,9. Peningkatan tersebut selaras dengan pandangan dari Kementerian PAN & RB yang menjelaskan bahwa peningkatan hasil Evaluasi AKIP menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah yang semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

11.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (70,9)	A (80,01)	88,61%

Tabel 66. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2022 dengan Renstra

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 dengan perolehan predikat A, maka tingkat kemajuan mencapai 88,61%.

11.4. Perbandingan Hasi Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ditemukan data perbandingan antara indikator kinerja Inspektorat Utama terkait Hasi Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama dengan indikator kinerja Inspektorat Kementerian/Lembaga lain. Namun Pada tahun 2021, tercatat bahwa nilai rata-rata SAKIP pada kementerian/Lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Rata-rata nasional sesungguhnya belum bisa dicapai dari hasil perolehan SAKIP Setjen DPR RI yaitu 65,31 (B). Namun dengan perolehan SAKIP Inspektorat Utama yang sangat baik pada tahun 2022, diharapkan dapat mendorong hasil penilaian SAKIP Setjen DPR RI pada tahun mendatang.

11.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	BB	118,14%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu: Komitmen dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.	1. Menyusun Rencana Aksi 2. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal di tahun berikutnya.

Tabel 67. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Nilai Evaluasi Sakip di Lingkup Inspektorat Utama

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 118,14% pada Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama disebabkan oleh adanya Komitmen dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, sedangkan upaya yang dilakukan kedepannya guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain menyusun rencana aksi sesuai *timeline* dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal di tahun berikutnya.

11.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	BB	118,14%	Rp114.527.000,-	Rp114.526.162,-	100%

Tabel 68. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama

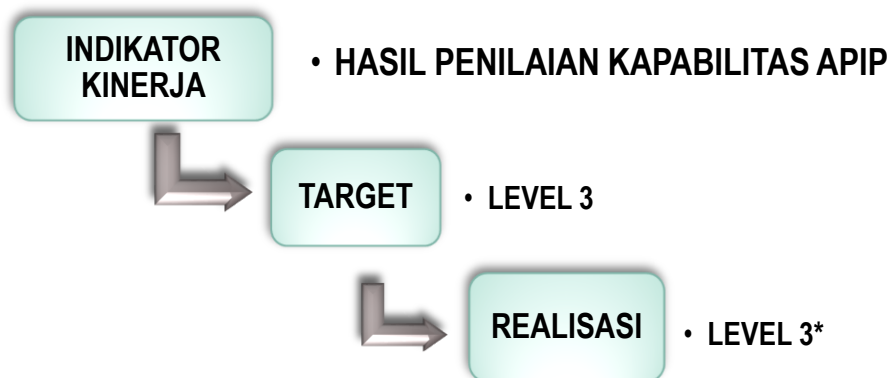
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah melebihi target dengan capaian sebesar 118,14% dengan implementasi anggaran mencapai 100%.

11.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis tentang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka Pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Perancangan Undang-Undang.
3. Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh.
4. Pemaparan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dalam rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

5. Pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Melakukan pendampingan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.



12.1 Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
Level 3	Level 3*	100%

*Realisasi Tahun 2021

Tabel 69. Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

Target Hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2022 yang berada pada Level 3 dapat tercapai dengan realisasi 100%, realisasi ini menggunakan penilaian dari BPKP RI tahun 2019, karena untuk Tahun 2022 belum diterbitkan oleh BPKP dan Kemenpan RB sampai dengan laporan ini selesai disusun, terakhir BPKP melakukan penilaian kapabilitas APIP pada tahun 2019 dengan nilai “**level 3 dengan catatan**”. Adapun tabel pengukuran nilai indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran. Namun pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal yang menyatakan bahwa kapabilitas apip tahun 2022 berada di level 3 dengan skor 3,328

Level 3 dapat diartikan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah

berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola.

12.2 Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	90%	Level 3	Level 3*	100%

*Realisasi Tahun 2021

Tabel 70. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil penilaian kapabilitas APIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berada di level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan..

12.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP Terhadap Target Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3*	Level 4	75%

*Realisasi Tahun 2021

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP Terhadap Target Dalam Renstra

Dari tabel di atas capaian Kapabilitas APIP jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 dengan perolehan level 4 dengan menggunakan nilai PMPRB, maka tingkat kemajuan mencapai 75%.

12.4 Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Dengan Standar Nasional Atau Capaian Kementerian/Lembaga Tinggi

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan belum rilisnya hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Adapun gambaran perbandingan penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Setjen DPD RI	Setjen DPR RI
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	2	3

Tabel 72. Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Dengan Setjen DPD RI

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kapabilitas Setjen DPD RI dan Setjen DPR RI tahun 2021 lebih rendah dibandingkan Setjen DPR RI.

12.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%	Faktor Penyebab Keberhasilan yaitu komitmen dalam menjalankan/ menindaklanjuti <i>area of improvement</i> dari hasil evaluasi BPKP.	Melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut dan memulai pemenuhan dari level 3 menuju level 4

*Realisasi Tahun 2021

Tabel 73. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Atas Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 100% pada hasil penilaian kapabilitas APIP disebabkan oleh adanya Komitmen dalam menjalankan/menindaklanjuti *area of improvement* dari hasil evaluasi BPKP, sedangkan upaya yang dilakukan kedepannya guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain Melakukan *monitoring* tindak lanjut dan memulai pemenuhan dari level 3 menuju level 4.

12.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%	Rp1.383.782.000,-	Rp1.383.781.500,-	100%

*Realisasi Tahun 2021

Tabel 74. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Atas Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Kapabilitas APIP” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan implementasi anggaran mencapai 100%.

12.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjang dalam peningkatan Kapabilitas APIP. Secara total terdapat 84 kegiatan yang dimaksudkan untuk menunjang Kapabilitas APIP. Kegiatan tersebut mencakup seluruh aktivitas pengembangan APIP seperti Diklat, Webinar/Seminar, *Workshop*, Pelatihan Sertifikasi Auditor, Bimbingan Teknis, *Benchmarking*, Paket Meeting, Kegiatan sebagai Narasumber, kegiatan sebagai Saksi Ahli pada saat persidangan, penyusunan PKPT berbasis risiko dan kegiatan-kegiatan lainnya.



**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

BAB IV REALISASI ANGGARAN

2022
Laporan Kinerja
Inspektoriat Utama Setjen DPR RI

BAB IV REALISASI ANGGARAN

A. PAGU ANGGARAN

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2022 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.801.262.000,- (delapan milyar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.267.755.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Inspektur Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.103.507.000,- (tiga milyar seratus tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah). Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2021) sebesar Rp8.551.565.000,- maka terdapat kenaikan sebesar Rp249.697.000,- atau sebesar 2,92%.

Pada Triwulan I (satu), Menteri Keuangan memberlakukan efisiensi anggaran sebesar 50% pada anggaran perjalanan dinas dan dialihkan untuk penanggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Anggaran Inspektorat Utama dialihkan sebesar Rp1.636.892.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Unit	Pagu Awal	Efisiensi	Pagu yang bisa direalisasikan
Inspektorat I	Rp3.430.000.000,-	Rp686.892.000,-	Rp2.743.108.000,-
Inspektorat II	Rp1.669.337.000,-	Rp461.028.000,-	Rp1.208.309.000,-
Inspektur Utama	Rp3.701.925.000,-	Rp488.972.000,-	Rp3.212.953.000,-
Total	Rp8.801.262.000,-	Rp1.636.892.000,-	Rp7.164.370.000,-

Tabel 75. Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan IV (empat), Inspektorat Utama mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk peningkatan kapabilitas APIP berupa sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dan *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA).

Adapun Pagu Anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir tahun 2022 yang dikelola sebesar Rp7.534.370.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.743.108.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Inspektur Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.385.366.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

Realisasi anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2022 mencapai Rp7.520.859.143,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar **99,82%** dari total pagu sebesar Rp7.534.370.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yang mencapai Rp7.004.962.285,- (tujuh milyar empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau 99,49% dari total pagu sebesar Rp7.040.920.000,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

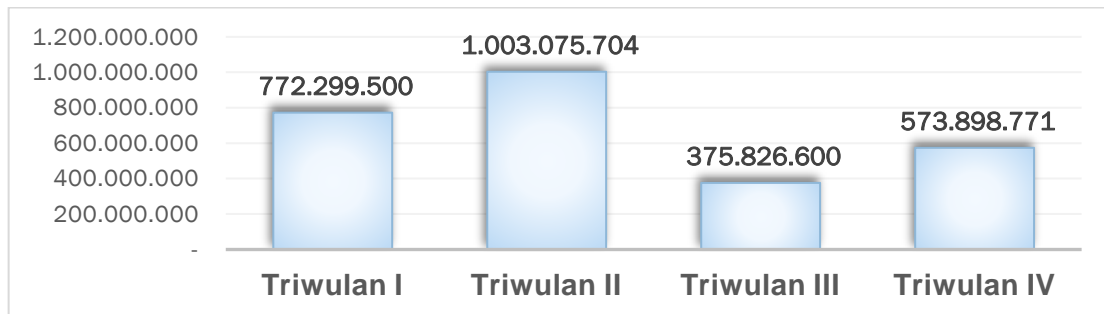
Realisasi kinerja anggaran Inspektorat Utama diatas 90% dikarenakan upaya memperbaiki secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja, perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan selalu dilakukan evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran, serta segera dicarikan solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

Penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama pada Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. INSPEKTORAT I

- Pagu Anggaran yang dikelola Inspektorat I sebesar Rp2.743.108.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah).
- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (empat) sebesar Rp2.729.600.575,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam

ratus ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 99,51% dari total pagu anggaran.



Grafik 6. Realisasi Anggaran Inspektorat I per Triwulan Tahun 2022

Penggunaan Anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1. Layanan Koordinasi Inspektorat I

- a) Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp506.779.715,- (lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dari pagu sebesar Rp506.868.000,- (lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp373.260.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp375.666.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

1.2. Layanan Pengembangan Kapabilitas APIP

- a) Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp734.769.960,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) dari pagu sebesar Rp734.785.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- b) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp44.860.400,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dari pagu sebesar Rp44.865.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

1.3. Layanan Audit Internal

- a) Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp164.530.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp165.480.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b) Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp161.289.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- c) Kegiatan Probitas Audit/Pemantauan/Pendampingan menggunakan anggaran sebesar Rp154.616.500,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari pagu sebesar Rp155.775.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- d) Kegiatan Pengawasan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp585.034.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp598.380.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

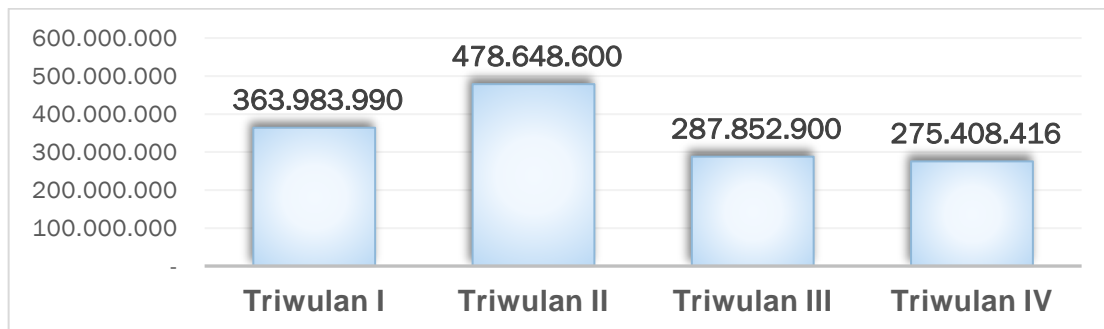
No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Layanan Koordinasi Inspektorat I	Rp882.534.000	Rp880.039.715	99,71%
2.	Layanan Pengembangan Kapabilitas APIP	Rp779.650.000	Rp779.630.360	99,99%
3.	Layanan Audit Internal	Rp1.080.942.000	Rp1.065.430.000	98,56%
Total		Rp2.743.108.000	Rp2.729.600.575	99,51%

Tabel 76. Realisasi Anggaran Inspektorat I

2. INSPEKTORAT II

- Pagu Anggaran yang dikelola Inspektorat II sebesar Rp1.405.896.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp1.405.893.906,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) atau 100,00% dari total pagu anggaran.



Grafik 7. Realisasi Anggaran Inspektorat II per Triwulan Tahun 2022

Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

2.1. Layanan Pengembangan APIP

- Kegiatan Pengembangan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp720.810.321,- (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dari pagu sebesar Rp720.811.000,- (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah); dan
- Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp218.585.555,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari pagu sebesar Rp218.586.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

2.2. Layanan Koordinasi Inspektorat II

- Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp12.140.000,- (dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp12.140.000,- (dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

2.3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI menggunakan anggaran sebesar Rp2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

2.4. Layanan Audit Internal

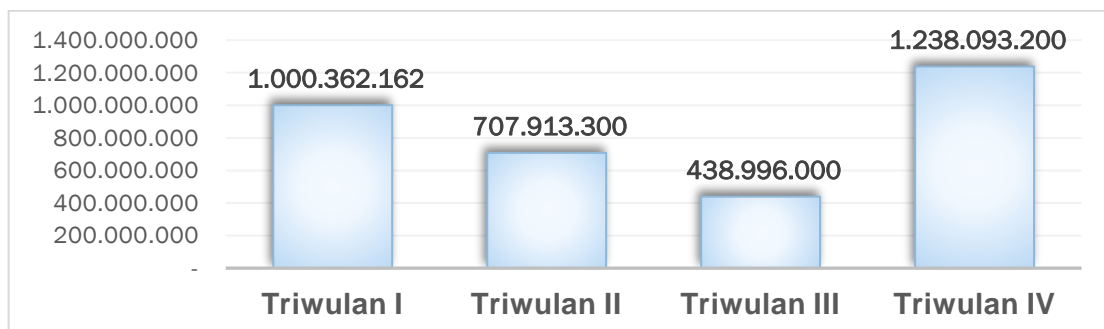
- a) Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b) Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- c) Kegiatan Evaluasi menggunakan anggaran sebesar Rp81.066.000,- (delapan puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp81.066.000,-; (delapan puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dan
- d) Kegiatan Pengawasan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp360.218.030,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu tiga puluh rupiah) dari pagu sebesar Rp360.219.000,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Layanan Pengembangan APIP	Rp939.397.000	Rp939.395.876	100%
2.	Layanan Koordinasi Inspektorat II	Rp14.240.000	Rp14.240.000	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.399.000	Rp2.399.000	100%
1.	Layanan Audit Internal	Rp449.860.000	Rp449.859.030	100%
Total		Rp1.405.896.000	Rp1.405.893.906	100%

Tabel 77. Realisasi Anggaran Inspektorat II

3. INSPEKTUR UTAMA

- Pagu Anggaran yang dikelola Inspektur Utama sebesar Rp3.385.366.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (empat) sebesar Rp3.385.364.662,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) atau 100,00% dari total pagu anggaran.



Grafik 8. Realisasi Anggaran Inspektur Utama per Triwulan Tahun 2022

Penggunaan Anggaran Inspektur Utama sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

3.1. Layanan Koordinasi Inspektorat Utama

- Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp510.231.000,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp510.231.000,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Kinerja menggunakan anggaran sebesar Rp105.781.162,- (seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah) dari pagu sebesar Rp105.782.000,- (seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI menggunakan anggaran sebesar Rp9.056.000,- (sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp9.056.000,- (sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah); dan

- d) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP/IACM dan Maturitas SPIP menggunakan anggaran sebesar Rp1.375.106.500,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) dari pagu sebesar Rp1.375.107.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).

3.2. Layanan Perkantoran

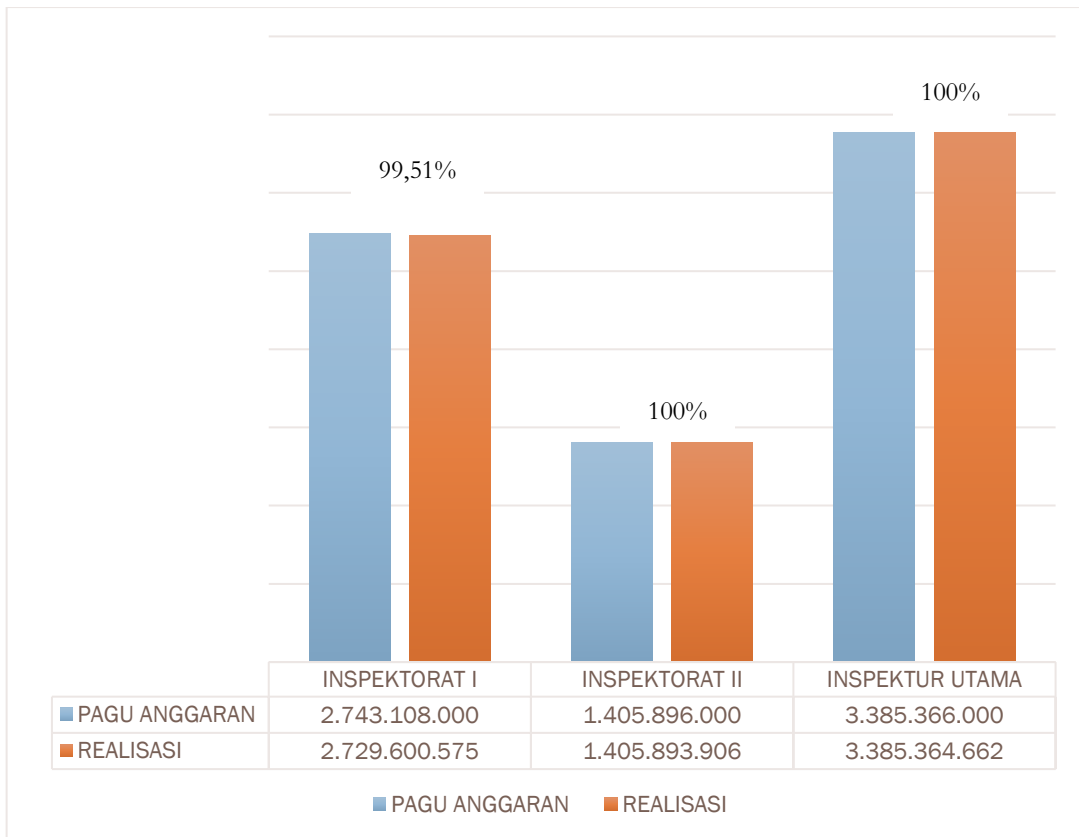
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor diantaranya Honorarium Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) dan *Manage Print Service* menggunakan anggaran sebesar Rp856.410.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp856.410.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

3.3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- a) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PMPRB dan PMPZI menggunakan anggaran sebesar Rp516.315.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp516.315.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); dan
- b) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi LHKPN, LHKASN, Gratifikasi, WBS dan SMAP menggunakan anggaran sebesar Rp12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Layanan Koordinasi Inspektorat Utama	Rp2.000.176.000	Rp2.000.174.662	100%
2.	Layanan Perkantoran	Rp856.410.000	Rp856.410.000	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp528.780.000	Rp528.780.000	100%
Total		Rp3.385.366.000	Rp3.385.364.662	100%

Tabel 78. Realisasi Anggaran Inspektur Utama



Grafik 9. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB*	96,47%	Rp7.534.370.000	Rp7.520.859.143	99,82%
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B*	100%			
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%			
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%			
		Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%			
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%			
		Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	4	200%			
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%			
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	AA	121,01%			
		Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B (60,01)	BB (70,9)	118,14%			
		Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%			

* Realisasi Tahun 2021

Tabel 79. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran



**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



BAB V PENUTUP

2022
Laporan Kinerja
Inspektorat Utama Setjen DPR RI

BAB V

PENUTUP

Pada tahun 2022 Inspektorat Utama melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas.
- b. Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- c. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- d. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama.

Secara umum kinerja Inspektorat Utama dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan dalam PK dan mengalami *progress* peningkatan nilai.

Target Kinerja Inspektorat Utama terbagi dalam 12 (dua belas) indikator, dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja terdapat 8 (delapan) indikator kinerja telah tercapai dengan catatan bahwa hasil capaian indeks reformasi birokrasi dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dari Kementerian PAN RB pada tahun 2022 belum terbit dan menggunakan penilaian tahun 2021. Sedangkan terdapat 2 (dua) Indikator yaitu persentase penyelesaian BPK dan APIP, nilai indeks reformasi birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja serta jumlah unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 mengalami capaian diatas target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja 2022. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum tercapai yaitu indeks reformasi birokrasi dan jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK.

Dengan capaian yang telah didapatkan pada tahun 2022, secara umum Inspektorat Utama telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dalam kinerjanya, Inspektorat Utama menggunakan anggaran dengan efektif, efisien dan ekonomis serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Realisasi anggaran mencapai **99,82%** seiring dengan peningkatan kinerja atau output yang baik adalah bukti dari akuntabilitas. Selain output terhadap kinerja, tidak hanya menggunakan anggaran negara pada tahun 2022, melalui penyelesaian tindak lanjut terhadap kerugian negara, Inspektorat Utama pada tahun 2022, telah berhasil menyelesaikan kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK dan APIP dan menyetorkan uang ke negara sejumlah Rp1.732.684.131,00 (satu milyar tujuh ratus

tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) untuk tindak lanjut rekomendasi BPK dan Rp20.087.540,00 (dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) untuk tindak lanjut rekomendasi APIP.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA
Jabatan : Inspektur Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2021
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001



Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA
NIP. 19620710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
		4. Tingkat kepatuhan LHKPN	100%
		5. Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
		2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama	B
		3. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen			Rp8.801.262.000,-

Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 21 Desember 2021
Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA
NIP. 19620714 198803 1 001



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Renstra 2024	Tingkat Kemajuan Terhadap Renstra
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB*	96,47%	AA	85,75%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B*	100%	A	81,62%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%	20	20%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	Tidak masuk target dalam renstra	
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%	Tidak masuk target dalam renstra	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3*	100%	Level 4	75%
		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	4	200%	Tidak masuk target dalam renstra	
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%	100%	86,75%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%	95%	76,97%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	AA	121,01%	AA	100%
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B (60,01)	BB (70,90)	118,14%	A (80,01)	88,61%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Renstra 2024	Tingkat Kemajuan Terhadap Renstra
		3. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3*	100%	Level 4	75%

* Realisasi Tahun 2021

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%	BB	BB	100%	A	BB*	96,47%
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	B	B	100%	B	B*	100%
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	2	2	100%	4	4	100%	6	4	67%
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepatuhan LHKASN	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3*	100%
		Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	-	-	-	2	3 Unit Eselon I	150%	2	4 Unit Eselon I	200%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	65%	73%	112%	70%	77%	110%	70%	86,75%	124%
		Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	-	-	-	70%	46,59%	66,55%	50%	73,13%	146%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB	100%	B	BB	100%	A	AA	121,01%
		Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (64,60)	100%	B	B (64,90)	100%	B (60,01)	BB (70,90)	118,14%
		Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3*	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama 2020-2022

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 - 100	Istimewa
2.	A	> 80 - 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 - 80	Baik
4.	B	> 60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	> 50 - 60	Cukup
6.	C	> 30 - 50	Buruk
7.	D	> 0 - 30	Sangat Buruk

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 85 - 100	Istimewa
2.	A	> 75 - 85	Memuaskan
3.	B	> 65 - 75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	> 50 - 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	> 0 - 30	Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>45 - 50	Istimewa
2.	A	>40 - 45	Sangat Baik
3.	BB	>35 - 40	Baik
4.	B	>30 - 35	Cukup Baik
5.	CC	>25 - 30	Cukup
6.	C	>15 - 25	Buruk
7.	D	0 - 15	Sangat Buruk

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 - 100	Istimewa
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama

No.	Kategori	Interpretasi
1.	Level 1 : <i>Initial</i>	Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
2.	Level 2 : <i>Infrastructure</i>	Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
3.	Level 3 : <i>Integrated</i>	Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
4.	Level 4 : <i>Managed</i>	Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
5.	Level 5 : <i>Optimizing</i>	Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP